



Studi Awal
Kemiskinan di Gunungkidul

2007

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1 Latar Belakang		
	1.1.1. Kemiskinan sebagai Problem Bangsa	1
	1.1.2. Potret Kemiskinan di Gunungkidul	5
	1.1.3. Potensi Di Balik Tandusnya Gunungkidul	10
	1.2 Tujuan Penelitian	12
	1.3 Manfaat Penelitian	12
	1.4 Metode Penelitian	13
BAB II	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	15
	2.1 Orang Miskin di Gunungkidul	16
	2.2 Siapa yang Miskin?	18
	2.3. Agenda Penanggulangan Kemiskinan	21
	2.4. Agenda Penanggulangan Kemiskinan Pekab Gunungkidul di Tahun 2007	25
BAB III	PENELITIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	30
	3.1. Persoalan Emiskinan Dan Pemenuhan Hak Dasar Warga	32
	3.1.1. Pertanian Sebagai Andalan Perekonomian Gunungkidul	33
	3.1.2. Kemiskinan dan Kesehatan	42
	3.1.3. Kemiskinan dan Pendidikan	51
	3.1.4. Peta masalah dan Alternatif Pemecahannya	55
	3.2. Peta masalah dan Alternatif Pemecahannya	55
	3.2.1 Peta Masalah	55
	3.2.2 Alternatif pemecahan Masalah	56
	3.2.2.1 Pendidikan Gratis	58
	3.2.2.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan	64
	3.2.2.3 Kampanye ” Ayo Sekolah”	65
	3.2.2.4 Penyediaan beasiswa bagi guru, alokasi dana pendidikan;	65

3.2.2.5	Sinergisitas <i>stakeholders</i> terkait;	66
3.2.2.6	Standarisasi pembiayaan untuk jenjang sekolah lanjutan;	66
3.2.2.7	Memberikan keterampilan kepada siswa SMP melalui Program SMP Plus.	66
BAB IV	ANALISIS POTENSI ANGGARAN DAERAH	67
4.1	Analisa Kebijakan Umum Anggaran 2007 Kabupaten Gunungkidul	67
4.2	Analisa Terhadap KUA Gunungkidul 2007	69
4.3	Analisis Belanja APBD Kabupaten Gunungkidul 2006	71
4.4	Analisis APBD Gunungkidul 2007	79
4.4.1	Pendahuluan	79
4.4.2	Analisis Pendapatan	80
4.4.3	Analisis Belanja	82
BAB V	Kesimpulan Studi dan Rekomendasi Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul	96
4.1	Bidang Kesehatan	96
4.2	Bidang Pendidikan	96
4.3	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	96

DAFTAR TABEL

Tabel.1	GINI RATIO garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Gunungkidul	6
Tabel.2	Proporsi KK Miskin tahun 2001	7
Tabel.3	Perkembangan Data KK Miskin	8
Tabel.4	GINI RATIO persebaran pendapatan	8
Tabel 5	Riset Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	15
Tabel.6	Gini Ratio Penyebaran Kemiskinan di Gunungkidul	16
Tabel.7	Proporsi KK miskin di Gunungkidul tahun 2005	16
Tabel.8	Perkembangan Data KK Miskin Tahun 2000-2004	17
Tabel.9	Gambaran Kondisi Infrastruktur Jalan	18
Tabel.10	Proporsi Jarak dan Kiblat Aktivitas Ekonomi	19
Tabel.11	Komparasi Lahan Pertanian	20
Tabel.12	Angka Putus Sekolah di Kantong Kemiskinan	20
Tabel.13	Angka Buta Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel.14	Agenda Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Gunungkidul Tahun 2006	23
Tabel.15	Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2006	25
Tabel.16	Skema Penelitian	31
Tabel.17	Luas dan Pemanfaatan Lahan di Gunungkidul	35
Tabeel.18	Penggunaan lahan bukan sawah dan luasnya	36
Tabel.19	Jenis lahan pertanian di 12 kecamatan pada bulan Oktober- Desember 2006	36
Tabel.20	Program Khusus untuk petani	37
Tabel.21	Fungsionalisasi KUD	39
Tabel.22	Kendala Pertanian di 12 Kecamatan	42
Tabel.23	Rasio belanja Kesehatan terhadap total belanja APBD Kabupaten/Kota Prop.DIY	

	tahun 2006	43
Tabel.24	Daftar Sumber-sumber Terbesar PAD Gunungkidul tahun 2006	44
Tabel.25	Belanja Kesehatan dalam APBD Gunungkidul tahun 2006	44
Tabel.26	Gambaran Kondisi Pelayanan Kesehatan	45
Tabel.27	SURVEY pelayanan kesehatan dengan menggunakan variabel (Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu, Dokter Praktek Pribadi, Bidan Desa, Mantri Desa)	46
Tabl.28	Pelayanan Kesehatan di 12 Kecamatan Wilayah Survey	46
Tabel. 29	Kepemilikan Dan Ketercukupan Sarana Mck Masyarakat	49
Tabel.30	Hasil Survey MI-GK tentang pengadaan air bersih dengan menggunakan variabel (Sumur PDAM Mata Air Beli swasta Penampungan Air Hujan)	51
Tabel.31	Hasil Survey Ketercukupan Sarana Air Bersih	52
Tabel.32	Rasio belanja pendidikan terhadap total belanja APBD Kabupaten/Kota Prop.DIY tahun 2006	53
Tabel.33	Jumlah Sekolah Negeri Di Gunungkidul	54
Tabel.34	Data Jumlah kelas, peserta didik, dan tenaga pengajar institusi pendidikan formal di Gunungkidul tahun 2005/2006	56
Tabel.35	Penghitungan Rasionalisasi Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis di Kabupaten Gunungkidul	62
Tabel.36	Simulasi Anggaran Untuk Pengeluaran Pendidikan Gratis	62
Tabel.37	Simulasi Anggaran Untuk sekolah swasta di DIY	63
Tabel.38	Plafonisasi Dana	68
Tabel.39	Plafon Dana Tertinggi	69
Tabel.40	Plafon Dana Terendah	69
Tabel.41	Lima “Juara” Penyumbang PAD Tertinggi	71
Tabel.42	Perbandingan Program Atau Kegiatan	

	Pemerintah Dan Program Untuk Masyarakat	72
Tabel.43	Analisisbelanja Apbd Kabupaten Gunungkidul 2006	72
Tabel 44.	Perbandingan pendapatan APBD Gunungkidul 2006 dan 2007	81
Tabel 45.	Daftar Sumber-sumber Terbesar PAD	82
Tabel 46.	Dana Perimbangan	82
Tabel.47	Tio belanja pendidikan terhadap total belanja APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2006-2007	47
Tabel 48	Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat	85
Tabel 49.	Bantuan PAUD tahun 2006-2007	85
Tabel 50.	Perbandingan beasiswa tahun 2006 dan 2007	85
Tabel 51.	Perbandingan belanja dinas kesehatan 2005,2006,2007	86
Tabel 52.	Program peningkatan kesehatan warga	87
Tabel 53.	Program spesifik untuk kelompok perempuan dan anak	88
Tabel 54.	Belanja dinas pertanian 2007	90
Tabel 55.	Beberapa Program di Dinas Pertanian	97
Tabel 56.	Jumlah Bantuan Pemerintah untuk Sector Peternakan	91
Tabel 57.	Beberapa Program di Sektor Peternakan Yang Ada Dalam APBD	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Mata Pencaharian Penduduk Menurut Lapangan Usaha	35
Gambar.2	prosentase penggunaan MCK oleh masyarakat pada 12 Kecamatan	49
Gambar.3	Perbandingan Dana BOS dengan Dana yang di Bayar Siswa SD	60
Gambar. 4	Persentase Dana BOS dengan Dana yang dibayar Siswa SLTP	61
Gambar. 5	Diagram Porsi Anggaran Penanganan Gizi Buruk	87
Gambar. 6	Rasio Jenis Kelamin di Gunungkidul	88
Gambar. 7	Skema Anggaran Pengentasan Kemiskinan Gunungkidul 2007	90
Gambar. 8	Anggaran Ternak KK Miskin	92
Gambar 9.	Perbandingan Panti Asuhan dan anak asuh di Gunungkidul Th. 2004-2005	93
Gambar.10	Jumlah dan Jenis bencana alam di Gunungkidul Th 2005	95

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

I. 1 Kemiskinan sebagai Problem Bangsa

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah Negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara

menyeluruh kualitas manusia Indonesia relative masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di Negara-negara lain di dunia. Berdasarkan *Human Development Report 2005* yang menggunakan data tahun 2004, angka *Human Development Index* (HDI) Indonesia adalah 0,692. angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US\$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2006).

Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya ketrampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang. Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah :

Pertama, konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni “kemiskinan pendapatan” atau “*income poverty*”. Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di Tanah Air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

Ketiga, kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Berbagai

peristiwa konflik di Tanah Air yang terjadi sepanjang krisis ekonomi, misalnya menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi dinamika sosial dan pemerintahan.

Keberadaan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, dokumen 2005) merupakan sebuah langkah maju pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. SNPK mencerminkan perubahan paradigma pemerintah dalam memandang kemiskinan. Apabila sebelumnya kemiskinan dipandang secara parsial sebagai kondisi kekurangan (kekurangan pangan, kekurangan pendapatan, kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar), maka kini pandangan mengenai kemiskinan mulai lebih komprehensif dan multidimensional. Setidaknya, perubahan paradigma tersebut tercantum dalam dokumen formal pemerintah, yaitu SNPK.

SNPK mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dalam penanggulangan kemiskinan di daerah peluang-peluang tersebut belum benar-benar operasional, karena masih terdapat *gap* antara idealitas SNPK dengan realitas lapangan. Beberapa dari *gap* tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masih lemahnya mainstreaming SNPK dalam pembangunan daerah di Indonesia sehingga SPKD belum menurunkan *pro-poor strategy* menjadi *pro-poor policy* dan menjadi *pro-poor budget*.

2. Masih berkembangnya cara pandang pemerintah daerah bahwa kemiskinan hanyalah 'eksternalitas' pembangunan, yang harus ditangani dengan program-program yang bersifat 'tambahan'.
3. Belum adanya regulasi dan sistem yang mengatur partisipasi publik dalam perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), realokasi APBD untuk realisasi SPKD, dan monitoring implementasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Studi yang dilakukan ini bermaksud mendeskripsikan peta kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bagaimana realisasi strategi tersebut di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DI Yogyakarta.

I.2 Potret Kemiskinan di Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu ikon daerah miskin di Indonesia. Pada dasawarsa 80'an, Gunungkidul terkenal dengan kekeringan dan bahan makanan gaplek (singkong kering yang dijemur). Selain itu, Gunungkidul pada era tersebut terkenal sebagai suplier buruh rumah tangga di ibukota Jakarta. Kondisi semacam itulah yang menjadikan Gunungkidul dikenal sebagai daerah miskin.

Gunungkidul merupakan satu dari 5 kabupaten/ kota yang berada di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta mempunyai luas wilayah 1.485,38 km² (148.536 Ha), yang merupakan 46,63 % wilayah propinsi DIY, dengan jumlah penduduk 759.859 jiwa, dengan komposisi penduduk 48,9 % laki-laki dan 51,1 % perempuan (Gunungkidul dalam Angka Tahun 2005), dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, sebelah Selatan Samudera Indonesia, sebelah Barat Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan sebelah Timur Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa dan 1.430 padukuhan.

Topografi Gunungkidul bergelombang, semua wilayahnya berada di atas pegunungan kapur kawasan Pegunungan Seribu yang membentang dari

Samudera Indonesi hingga ujung utara wilayahnya dengan ketinggian 0-800 mdpl. Luas wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis menyebabkan permasalahan kemiskinan di Gunungkidul menjadi spesifik. Sampai saat ini Gunungkidul masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin masih cukup tinggi. Selain itu, kemiskinan bisa dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunungkidul tahun 2006 yang hanya sebesar 69, 5.

Demikian pula jika dilihat dari sektor pendidikan melalui indikator Angka Partisipasi Murni. Pada tahun 2004, untuk jenjang SD/ MI APM sebesar 88,63 %, sementara untuk jenjang SMP/MTs APM sebesar 72,10 %, dan APM untuk SMA/SMK/MA sebesar 34,68 %. Turunnya APM dari tiap level pendidikan formal tersebut mengisyaratkan cukup tingginya angka melanjutkan sekolah di Gunungkidul.

Tabel.1. GINI RATIO Garis Kemiskinan dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Gunungkidul

No	Keterangan	2004	2005
1.	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln)	117.828	135.702
2.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	173.487	195.225
3.	Prosentase Penduduk Miskin (%)	25,26	28,06
4.	Gini Ratio	0,2369	0,2596
5.	Ketimpangan Menurut Bank Dunia	24,87	23,01

Diolah dari BPD Gunungkidul,2005

Berdasarkan penelusuran dokumen dan studi lapangan yang dilakukan oleh Tim Maarif Gunungkidul, kemiskinan di Gunungkidul hampir merata di semua kecamatan.

Tabel.2. PROPORSI KK MISKIN TAHUN 2001

No	Kecamatan	Jumlah KK		Proporsi KK Miskin (%)
		Total KK	KK Miskin	
1	Panggung	5.689	2.442	42,9%
2	Purwosari	4.185	1.811	43,3%
3	Paliyan	6.205	3.216	51,8%
4	Saptosari	7.197	6.333	65,0%
5	Tepus	7.602	5.206	65,5%
6	Tanjungsari	6.050	2.757	45,5%
7	Rongkop	6.788	5.864	85,4%
8	Girisubo	5.463	4.751	87,0%
9	Semanu	12.371	6.863	55,5%
10	Ponjong	11.319	7.549	65,7%
11	Karangmojo	13.172	5.028	35,2%
12	Wonosari	15.479	6.069	35,2%
13	Playen	13.059	4.176	32,0%
14	Patuk	7.136	2.953	41,4%
15	Gedangsari	7.421	4.088	55,1%
16	Nglipar	6.714	4.001	55,5%
17	Ngawen	6.822	2.508	35,5%
18	Semin	11.714	5.502	47,5%
	Gunungkidul	154.386	81.217	52,6%

Sumber : Data Kesejahteraan Sosial, Dinas Sobermas

Masalah kemiskinan di Gunungkidul masih didominasi kemiskinan di daerah pedesaan. Tercatat 50 % kecamatan dari 18 kecamatan yang ada mempunyai jumlah keluarga miskin di atas 50 % dari jumlah KK di kecamatan yang bersangkutan. Selebihnya, angka kemiskinan berkisar antara 30 % - 49 %. Kecamatan yang masuk dalam kategori kantong kemiskinan (Saptosari, Gedangsari, Tepus, Girisubo dan Rongkop) berada dalam daerah yang relatif jauh dari pusat aktivitas perekonomian dan pemerintahan yang terpusat di Wonosari (Ibukota Kabupaten).

Tabel.3. Perkembangan Data KK Miskin

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1	2000	85.418	362.300	54,27
2	2001	91.936	230.000	34,21
3	2002	96.701	174.099	25,86
4	2003	117.572	173.794	25,35
5	2004	121.436	173.487	25,26

Sumber : Bappeda Gunungkidul, 2005

Sementara itu, dari Rasio Gini dan Kriteria Oshima, ketimpangan di Gunungkidul masuk dalam kategori rendah dan moderat. Demikian juga secara spasial, ketimpangan di pedesaan dan perkotaan tidak menunjukkan angka yang mencolok. Hal ini menunjukkan jika persebaran kemiskinan hampir merata, baik di pedesaan maupun kawasan perkotaannya.

Tabel.4. GINI RATIO Persebaran Pendapatan

Daerah	2004		2005	
	Rasio Gini	Kriteria Oshimo	Rasio Gini	Kriteria Oshimo
Perkotaan	0,3013	Moderat	0,2709	Rendah
Pedesaan	0,2199	Rendah	0,2199	Rendah
Perkotaan + Pedesaan	0,2369	Rendah	0,2596	Rendah

Sumber : diolah dari Hasil Susenas 2005

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi di perkotaan. Masyarakat miskin di pedesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan tanah, kondisi tanah yang relatif kurang subur, banyaknya rumahtangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk pertanian yang dihasilkan.

Wilayah Gunungkidul memang dikenal sebagai daerah yang tandus dan berkapur, hampir keseluruhan lahan pertanian yang luasnya 100.303 Ha berupa

lahan kering, dari luas tersebut hanya 2.065 Ha yang mendapat irigasi teknis, setengah teknis. Kondisi tidak optimalnya irigasi menyebabkan masyarakat Gunungkidul mengembangkan tanaman palawija terutama jagung dan ubi kayu. Komoditi ubi kayu sejak dua tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan dengan luas panen mencapai 50.701 Ha. Sentra penghasil ubi kayu berada di kecamatan Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo dan Semanu.

Sementara itu, masyarakat miskin di kawasan pesisir menghadapi permasalahan khusus. Penduduk di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil dengan peralatan yang sederhana, sebagai buruh nelayan, pengolah dan pedagang ikan skala kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil pula. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan nelayan pendatang yang berasal dari daerah lain yang umumnya lebih berpengalaman dan berani melaut.

Faktor lain adalah besarnya ombak laut selatan membuat nelayan lokal yang sebagian besar menggunakan perahu motor tempel kesulitan melaut setiap saat. Hasil tangkapan yang kecil sekaligus juga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, pola usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit keluar dari jerat kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan menyebabkan terjadinya pewarisan kemiskinan antar-generasi.

Masalah kemiskinan di Gunungkidul juga terkait dengan keterisolasian wilayah. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada tahun 2005 yang menyebutkan sekitar 190

kabupaten termasuk kategori tertinggal. Di Propinsi DIY Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo termasuk bagian dari Kabupaten tertinggal.

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Gunungkidul mempunyai ketimpangan gender yang relatif lebih besar dibanding Sleman dan Bantul. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Dalam partisipasi politik juga demikian. Hal ini tergambar dari jumlah di DPRD Gunungkidul, anggota legislatif perempuan di DPRD Gunungkidul untuk periode 2004-2009 hanya 1 orang.

I.3 Potensi di Balik Tandusnya Gunungkidul

Meski dikenal seagai daerah yang tandus, sesungguhnya kaya akan air. Hanya saja air tanah yang terdapat di Gunungkidul terdapat di bawah permukaan tanah. Sedangkan untuk air permukaan, di Gunungkidul terdapat daerah aliran sungai (DAS) Oyo-Opak. Sedangkan untuk DAS bawah permukaan, terdapat DAS Bribin. Di wilayah tengah dan selatan terdapat sungai bawah tanah di Bribin, Ngobaran, Seropan dan Baron. Namun kesemuanya belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kendala peralatan dan teknologi untuk mengangkak air bawah tanah tersebut ke permukaan.

Sampai pada tahun 2005, produksi pertanian Gunungkidul masih didominasi oleh ubi kayu, dengan total produksi mencapai 690 ribu ton pada tahun 2005, menyusul kemudian jagung dan padi masing-masing 178 ribu ton dan 146 ribu ton. Sayangnya ubi kayu panen petani Gunungkidul masih diolah secara konvensional, dengan dijadikan gaplek. Padahal komoditi ini potensial dijadikan bahan baku untuk etanol. Namun sampai saat ini, industri yang hendak mengolah potensi itu masih dalam proses uji coba.

Gunungkidul juga kaya akan potensi bahan galian tambang. Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 1659/K/40/MEN/2004 tertanggal 1 Desember 2004, Gunungkidul ditetapkan sebagai salah satu kawasan karst. Potensi karst terdapat di perbukitan kecamatan Wonosari, Semanu, Ponjong, Tepus, Rongkop,

Girisubo, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, dan Panggang. Namun potensi bahan galian tersebut juga belum dimanfaatkan dengan optimal karena daya dukung infrastruktur perhubungan serta belum adanya investor yang serius menanganinya. Kondisi tersebut juga menyebabkan sektor pertambangan belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu, dibalik gersangnya tanah Gunungkidul, tersimpan potensi besar di kawasan pantainya. Gunungkidul memiliki kawasan pantai sepanjang 76 km yang memanjang di wilayah kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Pantai-pantai di Gunungkidul secara alamiah memiliki keindahan yang eksotik dengan pulau-pulau karang dan pasir putih dalam kejernihan airnya. Selain itu, potensi perikanan lautnya juga cukup menjanjikan, meliputi jenis ikan lobster, tuna dan yang lain. Sayangnya, segenap potensi laut tersebut juga belum bisa dioptimalkan mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum, pemerintah kabupaten Gunungkidul mengisyaratkan ada tiga zona pengembangan wilayah, yakni :

1. Wilayah Pengembangan Utara (Zone Batur Agung) : meliputi wilayah kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semin dan Ngawen; merupakan rencana wilayah pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, industri kecil, pariwisata, dan kawasan lindung serta hutan rakyat.
2. Wilayah Pengembangan Tengah (Zone Ledok Wonosari) : meliputi wilayah kecamatan Playen, Paliyan, Wonosari, Semanu, Karangmojo, Ponjong dan Rongkop; merupakan rencana wilayah pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengolahan hasil tambang bahan galian golongan C, kawasan lindung, hutan rakyat dan hutan wisata.
3. Wilayah Pengembangan Selatan (Zone Gunung Seribu) : meliputi wilayah Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo; merupakan rencana wilayah pengembangan pertanian tanaman pangan, tanaman keras, peternakan, pariwisata pantai, budidaya laut, pengolahan

bahan galian golongan C, kawasan lindung, hutan rakyat, pendayagunaan pelestarian sumber air bawah tanah.

II. Tujuan Penelitian

Dari paparan di atas, terdapat *gap* antara persoalan kemiskinan di Gunungkidul dan potensi kewilayahan yang dimilikinya. Berangkat dari hal tersebut, studi yang dilakukan ini bermaksud mendeskripsikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bagaimana strategi realisasinya di kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Oleh karena itu studi awal ini memandang perlu melakukan kajian terhadap tema kebijakan penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul dengan tujuan :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk pemenuhan pelayanan dasar khususnya pada kelompok miskin.

III. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi wilayah Gunungkidul, persoalan kemiskinan serta strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan Pemkab Gunungkidul.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun terhadap *stakeholder* lainnya.

IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode eklektik; gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam kerangka deskriptif. Metode penelitian tersebut mempunyai makna bahwa penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif kemudian mendeskripsikannya. Dari hasil data yang bersifat kuantitatif tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman ke lapangan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk survey dan FGD (*Focus Group Discussion*).

Kirk dan Miller (1986: 9) berpendapat istilah penelitian kualitatif awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif yang *quantification*. Menurut mereka ini, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dengan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Penelitian dalam studi ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menggunakan metode pengumpulan dan analisis data berupa PPA (*Participatory Poverty Assesment*), yang bersifat eklektik, gabungan kuantitatif-kualitatif, yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mengenai masalah kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan, penelusuran *budget* dan mendalami persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di akar rumput.

Spesifikasi dari PPA (*Participatory Poverty Assesment*) dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelusuran atas dokumen anggaran, kependudukan, kebijakan, serta diperkuat melalui observasi, wawancara mendalam (*indept interviem*) dan diskusi kelompok terfokus (FGD/*Focus Group Discussion*). Dalam hal ini, penelitian ini akan memanfaatkan data/ informasi yang relatif baru dengan studi kepustakaan dokumen di Pemkab Gunungkidul, DPRD Gunungkidul maupun dengan studi atas kliping pemberitaan di media massa, hasil-hasil penelitian seelumnya serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul.

Pemilihan metode tersebut dalam penelitian ini serta dalam menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, metode penelitian ini lebih mudah peka apabila berhadapan dengan kenyataan ganda serta lebih peka dan lebih dapat beradaptasi terhadap banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Kedua, metode ini lebih berkarakter partisipatif, dan obyektif dalam pengamatan suatu obyek kajian.

BAB II KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab ini menentengahkan gambaran geografi dan kependudukan Kabupaten Gunungkidul secara umum. Selain itu disajikan pula persebaran dan karakteristik penduduk miskin. Kajian ini dimaksudkan untuk meletakkan masalah kemiskinan dalam konteks kewilayahan secara luas. Dalam bab ini juga membahas data tentang kemiskinan Gunungkidul disertai informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk analisis tentang penyebab kemiskinan, kajian ulang terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel.5. Riset Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Riset Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
Mengetahui peta kebijakan (strategi) penanggulangan kemiskinan yang ada dan bagaimana realisasi strategi tersebut dengan proses pembuatan kebijakan daerah (khususnya dalam proses penyusunan anggaran daerah).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan seluruh dokumen kebijakan (tingkat nasional maupun daerah) yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah. 2. Analisa mengenai keterkaitan antar dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut. 3. Analisa mengenai realisasi dari berbagai strategi penanggulangan kemiskinan tersebut (misalnya untuk menjawab pertanyaan: apakah APBD dan berbagai Perda merefleksikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut).

2.1 Orang Miskin di Gunungkidul

2.1.1 Kemiskinan Menyebar, Hampir Merata Di Semua Wilayah Gunungkidul

Fenomena kemiskinan dan kondisi alam yang gersang dan tandus di Gunungkidul ibarat dua sisi dalam satu koin uang. Faktor aksesibilitas sosial ekonomi yang kurang karena infrastruktur belum memadai, keterisolasian, ketertinggalan wilayah (daerah tertinggal) belum memadai infrastruktur khususnya di perdesaan menjadi penyebab langgengnya kemiskinan di daerah tersebut.

Tabel.6. Gini Ratio Penyebaran Kemiskinan di Gunungkidul

No	Keterangan	2004	2005
1.	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln)	117.828	135.702
2.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	173.487	195.225
3.	Prosentase Penduduk Miskin (%)	25,26	28,06
4.	Gini Ratio	0,2369	0,2770
5.	Ketimpangan Menurut Bank Dunia	24, 87	23,01

Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2005

Berdasarkan penelusuran dokumen dan studi lapangan yang dilakukan oleh Tim Maarif Gunungkidul, didapati fakta bahwa kemiskinan di Gunungkidul hampir merata di semua kecamatan.

Tabel.7. Proporsi KK miskin di Gunungkidul tahun 2005

No	Kecamatan	Jumlah KK		Proporsi KK Miskin (%)
		Total KK	KK Miskin	
1.	Panggung	5.800	4.030	69,48
2.	Purwosari	4.248	1.755	43,31
3.	Paliyan	6.536	5.199	79,54
4.	Saptosari	7.794	5.987	76,82
5.	Tepus	7.858	4.550	57,90
6.	Tanjungsari	5.957	3.853	64,68
7.	Rongkop	6.964	4.162	59,76
8.	Girisubo	5.888	3.076	52,24
9.	Semanu	12.541	7.168	57,16
10.	Ponjong	11.744	6.406	54,55
11.	Karangmojo	13.349	8.202	61,44
12.	Wonosari	15.747	6.493	41,23
13.	Playen	13.244	7.661	57,85
14.	Patuk	7.340	3.772	51,39

15.	Gedangsari	7.570	5.949	78,59
16.	Nglipar	6.865	4.745	69,12
17.	Ngawen	7.198	5.217	72,48
18.	Semin	11.868	7.497	63,17
	Gunungkidul	158.512	95.722	

Sumber: Olah Data Maarif Institute for Culture and Humanity Gunungkidul, 2007

Tercatat 50% kecamatan dari 18 kecamatan yang ada mempunyai jumlah keluarga miskin di atas 50% dari jumlah KK di kecamatan yang bersangkutan. Selebihnya, angka kemiskinan berkisar antara 30%-49%. Kecamatan yang masuk dalam kategori kantong kemiskinan (Saptosari, Gedangsari, Tepus, Girisubo dan Rongkop) berada dalam daerah yang relatif jauh dari pusat aktivitas perekonomian dan pemerintahan yang terpusat di Wonosari (Ibukota Kabupaten).

Tabel.8. Perkembangan Data KK Miskin tahun 2000-2004

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bln)	Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
1	2000	85.418	362.300	54,27
2	2001	91.936	230.000	34,21
3	2002	96.701	174.099	25,86
4	2003	117.572	173.794	25,35
5	2004	121.436	173.487	25,26

Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2005

2.1. 2 Sarana dan Prasarana Perhubungan: *Isolasi Kemiskinan*

Kondidi geografis yang sangat luas dan dengan topografi berbukit-bukit menjadi kendala dalam transportasi antara daerah di Gunungkidul. Selain itu, kondisi jalan yang kurang memadai di daerah pedalaman menjadikan angkutan umum minim beroperasi di luar kawasan APW.

Infrastruktur transportasi yang paling parah meliputi sebagian besar wilayah Gedangsari, Tepus, Saptosari, Rongkop dan Girisubo. Meskipun sudah ada program perkerasan dari Pemkab ternyata belum bisa secara keseluruhan membuka desa-desa yang sangat terpecil, bahkan di sejumlah desa di kecamatan tersebut di atas masih terdapat jalan-jalan setapak. Tabel di bawah sebagai

ilustrasi kondisi jalan umum (jalan negara, propinsi dan kabupaten) di Gunungkidul pada tahun 2003 dan 2004

Tabel.9. Gambaran Kondisi Infrastruktur Jalan

Tahun	Kondisi Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
2003	503,29	133,74	185,93	17,70
2004	303,20	286,34	146,65	97,77

Sumber: BPS Gunungkidul, 2005

2.2 Siapa yang Miskin?

a. Petani: Kelompok Mayoritas Penduduk dalam Kubangan Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Gunungkidul tahun 2004 dan 2005, di kecamatan-kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan, mayoritas penduduknya adalah petani. Di wilayah tersebut, pertanian terkonsentrasi pada pengolahan ladang atau tegalan, itupun dilakukan hanya pada saat musim penghujan sedangkan pada musim kemarau para petani tidak bercocok tanam dan beralih profesi menjadi buruh migran (di kota lain; mayoritas di Kota Yogya dan Jakarta).

Daya dukung olah lahan pertanian yang terbatas menyebabkan sebagian besar petani di kantong kemiskinan mengkonversi profesinya pada musim kemarau sebagai buruh migran di daerah perkotaan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pusat aktivitas perekonomian dan minimnya sarana perhubungan menjadi tempat berdiam mayoritas KK miskin di Gunungkidul.

Tabel.10. Proporsi Jarak dan Kiblat Aktivitas Ekonomi

No	Kecamatan	Jarak terjauh ke Ibukota Kab. (km)	Kiblat Ekonomi dan Perhubungan
1	Panggang	40,00	Kab. Bantul
2	Purwosari	51,00	Kab. Bantul
3	Paliyan	17,00	Wonosari
4	Saptosari	29,90	Wonosari
5	Tepus	30,60	Wonosari
6	Tanjungsari	21,60	Wonosari
7	Rongkop	36,00	Wonosari
8	Girisubo	46,00	Wonosari
9	Semanu	14,00	Wonosari
10	Ponjong	24,00	Wonosari
11	Karangmojo	15,20	Wonosari
12	Wonosari	8,70	Wonosari
13	Playen	18,00	Wonosari
14	Patuk	33,00	Kab. Bantul
15	Gedangsari	37,00	Wonosari
16	Nglipar	20,60	Wonosari
17	Ngawen	35,00	Kab. Klaten
18	Semin	29,00	Kab. Klaten

Sumber: Diolah dari data BPS Gunungkidul, 2005

b. Petani dan Buruh di Kawasan APW (Aglomerasi Perkotaan Wonosari)

Di kawasan APW (Aglomerasi Perkotaan Wonosari) (Wonosari, Playen, dan Karangmojo), angka kemiskinan relatif lebih rendah. Di wilayah ini masyarakat kelas menengah (umumnya birokrasi dan pedagang) banyak berdomisili. Penduduk miskin di wilayah tersebut banyak bekerja di sektor pertanian dan sebagian lagi sebagai buruh.

Lahan pertanian di daerah APW juga semakin menyempit karena ekspansi alih guna lahan pertanian untuk perumahan, kantor dan tempat usaha (jasa dan industri). Kepemilikan lahan pertanian yang sempit menyebabkan hasil panen per petani di daerah APW tidak memadai.

Tabel.11. Komparasi Lahan Pertanian

No	Kecamatan	Luas Pemukiman (ha)	Luas Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)
1	Wonosari	2.138	82	7.469
2	Karangmojo	3.397	610	7.402
3	Gedangsari	1.913	1.350	5.509

Sumber: Diolah dari data BPS Gunungkidul, 2005

c. Kelompok Putus Sekolah, Irisan dalam Himpunan Kemiskinan

Dari data BPS mengenai struktur pendidikan formal, masyarakat di tiga kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi (lebih dari 80%), yakni Saptosari, Rongkop dan Girisubo serta kecamatan dengan kondisi geografis paling sulit (Gedangsari) yang merupakan kantong kemiskinan di Gunungkidul memiliki angka putus sekolah yang tinggi di banding kecamatan lain.

Tabel.12. Angka Putus Sekolah di Kantong Kemiskinan

No	Kecamatan	Lulus SDN	Masuk SMPN	Putus Sekolah
1	Saptosari	557	174	383
2	Rongkop	407	119	288
3	Girisubo	388	235	153
4	Gedangsari	609	439	170

Sumber: Diolah dari data BPS Gunungkidul, 2005

d. Kelompok Perempuan, Himpunan Bagian dari Kemiskinan

Dengan proporsi penduduk perempuan sebesar 51,1% dari total penduduk, ternyata sebagian besar dari kaum perempuan masih menempati kolong kemiskinan. Jika salah satu variabel dilihat dari jumlah penduduk buta aksara, prosentase perempuan masih lebih banyak dibanding kaum lelaki, maka perempuan adalah kontributor penduduk miskin terbesar di Gunungkidul.

Tabel.13. Angka Buta Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Panggung	857	1.394
2	Purwosari	1.423	2.859
3	Paliyan	1.421	2.327
4	Saptosari	842	949
5	Tepus	153	383
6	Tanjungsari	848	1.031
7	Rongkop	1.369	1.542
8	Girisubo	1.129	1.671
9	Semanu	410	674
10	Ponjong	373	416
11	Karangmojo	2.268	3.071
12	Wonosari	1.503	2.230
13	Playen	87	76
14	Patuk	5.839	5.918
15	Gedangsari	404	476
16	Nglipar	788	868
17	Ngawen	103	301
18	Semin	393	815
TOTAL		20.210	26.901

Sumber: Dinas Pendidikan Gunungkidul, 2006

2.3. Agenda Penanggulangan Kemiskinan

Pada tanggal 27 Maret 2003 para Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia menghasilkan Deklarasi Yogyakarta tentang Komitmen Bersama Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Dengan demikian sudah menjadi suatu keharusan komitmen tersebut direalisasikan oleh Bupati Gunungkidul.

Pada tahun 2005, dengan terpilihnya Suharto, SH sebagai Bupati Gunungkidul maka agenda penanggulangan kemiskinan tersebut pun juga menjadi Agenda yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul.

Visi Gunungkidul tahun 2005-2010 adalah menjadi pemerintah daerah yang baik dan bersih, responsive, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi
2. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat

3. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wilayah yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kewilayahan
4. Mewujudkan pengembangan dunia usaha dan koperasi

Arah dan sasaran pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2010 adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
2. Penanganan/pengurangan pengangguran
3. pemberdayaan masyarakat
4. pengentasan kemiskinan

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten GK mengusung agenda percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai isu utama dalam agenda pembangunan 2008. Agenda awal penanggulangan kemiskinan dalam kepemimpinan Suharto, SH maka bisa dilihat ada 22 Kegiatan yang direncanakan oleh Pemkab GK dalam tahun 2006.

Karena belum tersusunnya SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Gunungkidul, sehingga agenda penanggulangan kemiskinan masih belum memiliki strategi yang baik, dan menyebabkan masih sebatas prioritas-prioritas pembangunan dan agenda penanggulangan kemiskinan hanya jadi program tahunan yang tidak pernah cukup efektif untuk menanggulangi kemiskinan di Gunungkidul. Agenda-agenda Penanggulangan kemiskinan tahun 2006 tersebut (berdasarkan pemaparan Bupati Gunungkidul dalam Lokakarya yang diselenggarakan Maarif Institute) yakni :

Tabel.14. Agenda Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Gunungkidul Tahun 2006

NO.	KEGIATAN	SKPD
1	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	Bappeda & Dep. PU
2	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat & DEP DAGRI
3	Beasiswa dan Bantuan Biaya Sekolah	Dinas Pendidikan & Depdiknas
4	Pengembangan pertanian & hortikultura	Dinas Pertanian TP & Perikanan
5	Pengembangan koperasi	Dinas Perekonomian
6	Penguatan Modal Usaha Mikro (Pedagang dan Pengrajin Kecil)	Dinas Perekonomian
7	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	BPS, Kantor Pos & Depsos
8	Padat karya	Disnakertrans
9	Beras Miskin (RASKIN)	Bagian Ekobang
10	Dukungan Bantuan & Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Prop. DIY & Depsos
11	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinkes, DEPKES & PT Askes
12	Bantuan Bibit Kakao, Hutan Rakyat, HKm, Konservasi Hutan	Dinas Hutbun
13	Pengembangan Peternakan (Ayam buras, Itik, dan Kambing)	Dinas Peternakan
14	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum
15	Bantuan sarana prasarana perumahan & permukiman	Dinas Sobermas
16	Pengembangan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT)	Bappeda & K PDT RI
17	Intervensi gizi dan ketahanan pangan	Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian
18	Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	Dinas Pertanian
19	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (LUEP)	Dinas Pertanian
20	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan
21	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Propinsi DIY & Dinas Sobermas Kab. Gunungkidul
22	Program Pembangunan Desa	Dinas Sobermas, Bagian Pemerintahan Desa & SKPD lainnya

sumber: Olahan Paparan Bupati Gunungkidul dalam Lokakarya *Maarif Institute*

Peran Pemerintah Kabupaten yang seharusnya dilakukan dalam upaya PK (Penanggulangan Kemiskinan) adalah:

1. Mengupayakan penyerasian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada.
2. Menciptakan komunikasi interaktif dan sinergi antar unsur multi-pihak (Pemkab, Ormas, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dsb).
3. Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
4. Mendorong optimalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TK-PKD).

Ada beberapa kegiatan PK di tahun 2006 yang tidak berjalan optimal, seperti :

1. Beasiswa dan bantuan biaya sekolah
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (LUEP)
3. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil
4. Bantuan sarana prasarana perumahan & permukiman
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
7. Pengembangan koperasi
8. Pengembangan pertanian & holtikultura

Dalam agenda-agenda penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul (misalnya saja pada kecamatan tertinggal) selama ini tidak mendapat perhatian yang cukup baik dikarenakan pendekatan pembangunan yang dipakai hanya berorientasi pertumbuhan dan memandang tujuan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yakni dalam peningkatan produksi saja.

Proses pembangunan terpusat pada produksi, sedangkan penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan hanya menempati urutan kedua, dan dicapai melalui mekanisme efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Kendala yang akan dihadapi dalam paradigma ini yaitu konsentrasi, polarisasi dan marginalisasi.

Salah satu hal lain yang perlu dicatat, berkaitan dengan bias kebijakan pembangunan adalah terjadinya bias kota, dimana pembangunan hanya terkonsentrasi di kota-kota saja, sementara wilayah pinggiran/perbatasan di pedesaan kurang diperhatikan. Misalnya saja bisa dilihat dari kondisi perkembangan sektor pendidikan, kesehatan serta iklim perekonomian pusat kota dan pinggiran. Hal tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih terhadap desa dan wilayah perbatasan agar berlangsungnya pembangunan dapat berjalan secara adil dan merata antar wilayah.

Terdapat 22 prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2006, itupun tidak didukung dengan anggaran yang mencukupi keefektifan program/kegiatan. Bisa dilihat komposisi anggaran untuk beberapa SKPD, yakni:

Tabel.15. Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2006

NO	BIDANG	INSTANSI	NOMINAL (RP)	ALOKASI APBD (%)
1	Administrasi Umum Pemerintahan	-	138.046.119.806,38	26,602
2	Pertanian dan Peternakan	-	16.327.115.170,00	3,146
3	Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.039.889.812,00	0,971
4	Perindustrian dan Perdagangan	-	6.990.441.795,60	1,347
5	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.155.405.008,00	0,801
6	Kesehatan	-	47.955.174.083,60	9,241
7	Pendidikan dan Kebudayaan	-	217.530.408.569,12	41,920
8	Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13.609.738.910,00	2,623
9	Pekerjaan Umum	Dinas PU	54.311.777.244,60	10,466
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan	3.447.801.522,80	0,664
11	Lingkungan Hidup	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	1.716.545.215,20	0,331
12	Kependudukan	-	6.262.475.221,50	1,207
13	Kepariwisataan	Dinas Pariwisata&Budaya	3.543.650.956,00	0,683

(Analisis rinci menyusul di lampiran)

2.4. Agenda Penanggulangan Kemiskinan Pemkab Gunungkidul di Tahun 2007 :

1. Program-program sebagaimana tertuang di RKPD dan RKA SKPD yang secara spesifik berupa program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan baik di bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

2. Program ND (*Neighborhood Development*) atau Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Terpadu (P2LPT) berbasis komunitas ke Dep. Kimpraswil sebagai tindak lanjut program P2KP.
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diusulkan ke Pusat (Dirjen PMD dan Departemen Kimpraswil). Program ini merupakan pengintegrasian antara PPK dan P2KP yang dimulai pada tahun 2007 sampai dengan 2009.
4. Pengembangan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP- DT).
Untuk program P2KP-DT ini ada 5 kecamatan yang menjadi wilayah garapan program dari kebijakan pembangunan daerah tertinggal (PDT) Gunungkidul 2007-2009, yakni Kecamatan Gedangsari, Purwosari, Saptosari, Girisubo, dan Tanjungsari.

Kelima kecamatan ini dipilih sebagai daerah yang perlu ditingkatkan pembangunannya dari kondisi ketertinggalannya dikarenakan ada banyak faktor yang menyebabkan kecamatan-kecamatan tersebut tidak berkembang.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketertinggalan, yakni : kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana, dan kebijakan pembangunan.

a. Geografis

Kondisi alam yang berbukit-bukit juga mempengaruhi keberadaan media komunikasi dan telekomunikasi seperti jaringan telepon, sehingga belum semua desa di 5 (lima) kecamatan tertinggal tersebut dapat menikmati akses komunikasi dengan baik. Ini nantinya memunculkan program “Desa Berdering” dalam salah satu kebijakan pengembangan sarana prasarana daerah tertinggal tahun 2007-2009.

b. Sumber daya alam

Kecamatan Purwosari, Saptosari, Girisubo, dan Tanjungsari adalah kecamatan yang terletak di kawasan selatan atau kawasan *karst* yang

litologinya disusun oleh batu gamping. Potensi sumber daya alam lahan sangat terbatas dikarenakan kondisi lahan yang marginal dengan ketebalan tanah (solum tanah) relatif tipis (5-30cm) sehingga kurang produktif untuk kegiatan pertanian. Selain itu di 4 kecamatan ini sulit dijumpai air permukaan, sehingga kegiatan pertanian hanya mengandalkan air hujan (dengan frekuensi panen setahun sekali).

Keempat kecamatan ini berpotensi bahan galian batu gamping, namun karena keberadaannya di kawasan karst, maka pemanfaatannya sangat terbatas, sehingga tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran.

Untuk Kecamatan Gedangsari potensi lahan lebih baik dari keempat kecamatan di atas, namun demikian kemiringan lahan cukup terjal sehingga pemanfaatannya memerlukan perhatian khusus. Potensi galian di Gedangsari adalah golongan C, yaitu Zeolit. Namun demikian, karena kondisi lereng yang dikhawatirkan dapat menyebabkan bencana longsor, keseimbangan sistem hidrologi (daerah tangkapan air), maka penambangan Zeolit tidak bisa dilakukan secara besar-besaran.

c. Sumber daya manusia

Pada umumnya tingkat pendidikan relatif rendah dengan tingkat pendidikan sebagian besar tamatan Sekolah Dasar.

d. Prasarana dan sarana

Kondisi prasarana merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah. Kondisi prasarana dan sarana yang meliputi prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, air bersih, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang ada di lima kecamatan ini masih sangat terbatas.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam riset pemenuhan pelayanan dasar yang dilakukan oleh *Maarif Institute for culture and humanity* (pada bab 3) terlihat angka/persentase ketercukupan sarana

dan prasarana di 12 (dua belas) kecamatan yang diteliti dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Gunungkidul.

e. Daerah rawan bencana

Kecamatan Purwosari, Saptosari, Girisubo, dan Tanjungsari mengalami bencana kekeringan (kelangkaan air) setiap tahunnya. Sedangkan Gedangsari setiap tahunnya selama musim penghujan sering terjadi longsor. Sebagaimana gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di DIY, yang termasuk Gunungkidul menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerusakan berbagai infrastruktur yang ada.

f. Kebijakan pembangunan

Kebijakan pembangunan yang tidak tepat kadangkala juga menjadi penyebab ketertinggalan suatu daerah karena terjadinya *policy bias* tersebut. Sebagai contoh program-program yang diluncurkan tidak sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, baik kondisi lahan maupun kondisi lainnya sehingga program yang diluncurkan tersebut tidak tepat sasaran.

Ada 13 (tiga belas) kebijakan operasional P2KP- DT, yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daerah tertinggal yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan air bersih sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2. Meningkatkan pengembangan kualitas tenaga kerja terampil (*skilled worker*).
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Meningkatkan keterpaduan dan keserasian program-program pembangunan Kabupaten dengan program Pemerintah Propinsi dan Pusat.

5. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
 6. Mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan.
 7. Revitalisasi pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri.
 8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai dan representatif.
 9. Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah berbasis pada sumber daya lokal.
 10. Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber daya ekonomi produktif yang meliputi permodalan, pemasaran, akses pasar, informasi dan teknologi.
 11. Mengurangi resiko bencana alam melalui pengembangan sistem deteksi dini bencana alam secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.
 12. Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan fisik, sosial, dan ekonomi akibat bencana alam.
 13. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antar daerah yang saling menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
5. Program Terpadu PAWONSARI (Pacitan-Wonogiri-Wonosari), kerjasama lintas-daerah dalam kaitannya dengan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memandang adanya kunci pokok untuk melaksanakan serta mensukseskan agenda Penanggulangan Kemiskinan harus ditekankan pada optimalisasi fungsi dari 4 pilar, yani :

Reformasi birokrasi, Masyarakat, Swasta, Alam.

Kesimpulan awal :

1. Analisis KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Gunungkidul 2007 (beberapa sektor pembangunan tidak mengakomodir program pengentasan kemiskinan, dalam KUA juga tidak dijelaskan mengenai pendanaan KUA.
2. Audit keuangan hanya terbatas pada Bawasda. Apakah ada *participatory* audit? Audit independen? Setidaknya peran serta masyarakat dalam penganggaran (*Participatory Budget*).
3. Perlu adanya data induk kemiskinan dengan format baru yang menjadi referensi semua SKPD dalam merencanakan serta menjalankan program pembangunan.
4. Peralihan kelembagaan dari KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) menjadi Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TK-PKD).
5. Parameter anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan PK, serta dana yang responsive dan adanya progressive realization dalam anggaran penanggulangan kemiskinan.
6. *Check-list* antara pemerintah-masyarakat visi misi apakah sudah *pro-poor*, program, kegiatan dan proporsi anggaran ->RKP
7. "Citizen Charter" menjadi penting dan mendesak untuk dihadirkan, sebagai pintu masuk kesepahaman dan kesepakatan antar-pihak dalam aktivitas dan prioritas pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul.

BAB III PENELITIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Bab III ini membahas mengenai respon/persepsi masyarakat Gunungkidul terhadap pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan) yang diselenggarakan oleh Pemkab Gunungkidul serta pelayanan bidang pertanian yang menjadi kancah aktivitas produksi mayoritas masyarakat Gunungkidul. Dalam kajian ini meliputi apakah kebijakan-program-kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemkab Gunungkidul tersebut berdampak pada pemenuhan hak dasar warga, perluasan akses dan kesempatan, peningkatan partisipasi, perlindungan sosial serta apa kendala/keluhan yang masih dirasakan oleh masyarakat.

SKEMA PENELITIAN

Tabel.16. Skema Penelitian

Riset Partisipatoris mengenai Realisasi Penanggulangan Kemiskinan	
Mengetahui bagaimana upaya pemerintah untuk pemenuhan pelayanan dasar khususnya pada kelompok miskin. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan peta pemenuhan pelayanan dasar di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Participatory Poverty Assesment</i> mengenai realitas kondisi kelompok miskin selama 5 tahun terakhir dan prioritas oleh <i>beneficiaries</i>. 2. Analisa mengenai kaitan antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dan realitas keberhasilan kebijakan tersebut (<i>Poverty and Social Impact Analysis/PSIA</i>).

Sumebr:?????

Riset pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh MI rentang November 2006 hingga April 2007 dengan beberapa aktivitas pengumpulan informasi dari warga masyarakat, Eksekutif (birokrasi), dan legislatif (DPRD). Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan melakukan :

1. Pengumpulan Informasi di lapangan, melalui penelitian terhadap pemenuhan pelayanan dasar publik kabupaten gunungkidul yang dilakukan selama 4 bulan (Oktober 2006 - Januari 2007) di 12 kecamatan gunungkidul. Aktivitas berupa survei (memakai questioner) dan wawancara mendalam;
2. Diskusi kelompok terfokus pada 3 sektor bahasan (pendidikan, kesehatan, pertanian). Diskusi kelompok dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat di Gunungkidul (PKBM, Posyandu/kader kesehatan, kelompok tani), komite sekolah & Sekolah, Pemkab Gunungkidul (instansi terkait pada 3 sektor di atas), DPRD Gunungkidul, akademisi, serta LSM di DIY. Diskusi ini dilakukan sebanyak 10 kali sejak Januari - Maret 2007;
3. Serial diskusi
Serial diskusi ini dilakukan dengan melibatkan LSM di DIY, DPRD Gunungkidul & DPRD Prop DIY, serta Pemkab Gunungkidul. Serial diskusi telah dilakukan sebanyak 3 kali (rentang Maret-April 2007) dengan mengusung Penanggulangan kemiskinan di gunungkidul dan pemenuhan pelayanan dasar warga sebagai prioritas pembangunan kabupaten Gunungkidul;
4. Lokakarya riset pemenuhan pelayanan dasar warga
Lokakarya ini dilakukan pada tanggal 14 April 2007. Lokakarya dimaksudkan untuk melakukan *cross check* terhadap hasil temuan di lapangan oleh tim MI.

5. Lokakarya warga

Lokakarya warga ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2007 yang dimaksudkan untuk menggagas format partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan hingga pada proses monitoring dan evaluasi kebijakan kabupaten gunungkidul;

3.1 PERSOALAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR WARGA

Arah dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2010 adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
2. Penanganan/pengurangan pengangguran;
3. pemberdayaan masyarakat;
4. pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten GK mengusung percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai isu utama dalam agenda pembangunan 2008. Seperti halnya arahan pembangunan Gunungkidul yang diarahkan pada 4 hal di atas, maka untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wilayah yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kewilayahan, pengembangan dunia usaha dan koperasi sudah menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders untuk mewujudkan visi Gunungkidul 2005-2010, yakni menjadi pemerintah daerah yang baik dan bersih, responsive, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif.

Persoalan kemiskinan terkait dengan persoalan berhasil/tidaknya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang kerap dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan

adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya manusia nya perlu dilihat dari komposisi penduduk itu sendiri serta peta persoalan dan upaya pemecahan ataupun peningkatan dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin menunjukkan piramida penduduk struktur umur muda yaitu ditandai dengan penggelembungan jumlah penduduk di usia muda, misalnya pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja baru. Selain itu, adanya kecenderungan larinya penduduk usia kerja awal (mulai 20 tahun) keluar daerah juga perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak kehilangan sumber daya manusia untuk membangun wilayah sendiri. Penduduk usia muda ini perlu dioptimalkan sehingga menjadi produktif dan bukan menjadi beban daerah.

Upaya produktivitas penduduk di usia muda ini dilakukan melalui pemberdayaan, kondusivitas sektor perekonomian, baiknya kualitas sumber daya manusianya (melalui peningkatan kualitas pendidikan), dan juga baiknya kualitas kesehatan. Untuk itu pemenuhan pelayanan dasar warga mutlak menjadi agenda yang harus dijalankan oleh pemerintah (tidak hanya dilakukan setengah hati), dan juga melalui sinergisitas semua pihak.

3.1.1. Pertanian Sebagai Andalan Perekonomian Gunungkidul

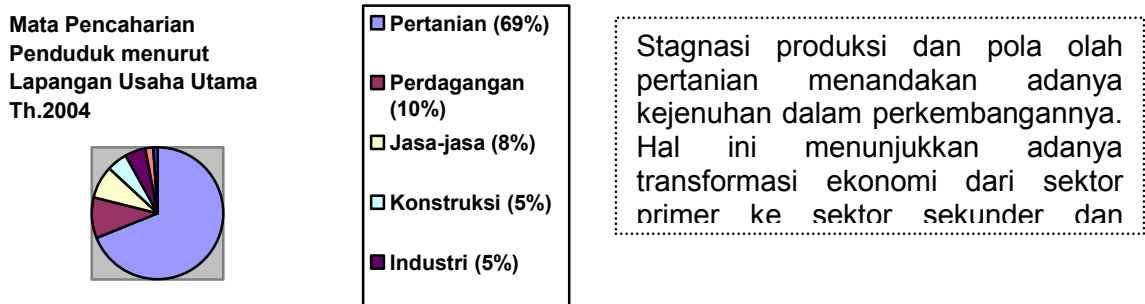
Jika dilihat dari sektor mata pencaharian, sektor pertanian masih menjadi andalan matapencaharian penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan persentase sebesar 69%. Namun demikian pertanian mengalami kecenderungan sulit naik atau cenderung ke arah stagnan, yang seakan tidak bisa lagi berkembang.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang kerap

dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan

perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Gunungkidul berasal dari sektor pertanian, yaitu 37,87%. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa, yakni sebesar 14%.

Gambar 1. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Lapangan Usaha



Sumber:???????

Gunungkidul merupakan satu dari 5 kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta mempunyai luas wilayah 1.485,36 km² (148.536 Ha), yang merupakan 46,63% dari wilayah Propinsi DIY. Luas lahan dan jenis lahan di Gunungkidul (tahun 2005) bisa dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel.17. Luas dan Pemanfaatan Lahan di Gunungkidul

Jenis Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
Sawah	7626	5,13%
Bukan Sawah	140910	94,87%
Total Luas Lahan	148536	100%

sumber: Olahan data BPS Gunungkiudl, 2005

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar dimanfaatkan untuk tegal/ladang/kebun sebesar 48,07%. Selanjutnya ditempat kedua adalah bangunan dan pekarangan sebesar 17,82%, dan tempat ketiga adalah tanaman kayu-kayuan dan hutan rakyat sebesar 17,37%.

Tabel.18. Penggunaan lahan bukan sawah dan luasnya

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Bangunan dan Pekarangan	25.097	17,82 %
Kolam/tebat/empang/tambak	108	0,07 %
Tegal / ladang / kebun	67.687	48,07 %
Tidak diusahakan	675	0,48 %
Tanaman keras / hutan rakyat	24.472	17,37 %
Hutan negara	13.755	9,76 %
Lainnya	9.006	6,39 %
TOTAL	140.809	100 %

diolah dari: *Gunungkidul dalam angka 2005*)

Jenis lahan pertanian di 12 kecamatan (berdasar hasil survey *Maarif institute* pada bulan Oktober- Desember 2006) :

Tabel.19. Jenis lahan pertanian di 12 kecamatan pada bulan Oktober- Desember 2006

Kecamatan	Jenis lahan pertanian
Nglipar	Hutan negara Hutan rakyat Tegalan Sawah (irigasi dan non irigasi) Pekarangan Kolam
Ngawen	Sawah Tegalan Pekarangan Hutan rakyat
Ponjong	Sawah Tegal Hutan rakyat pekarangan
Gedangsari	Ladang/ tegalan Sawah Hutan rakyat Pekarangan
Semanu	Tegalan Hutan
Karangmojo	Sawah basah Sawah tada hujan Tegalan Pekarangan Kehutanan Kolam perikanan darat
Rongkop	Sawah tadah hujan Hutan rakyat

Tepus	Tegalan Hutan rakyat
Paliyan	Ladang Hutan
Panggung	-
Purwosari	-
Saptosari	-

Dari hasil penelitian *Maarif Institute* melalui kegiatan diskusi terfokus dengan kelompok petani, Lokakarya (dengan mempertemukan pemerintah dan masyarakat), serial diskusi antara pakar (pertanian) dengan kelompok petani diidentifikasi beberapa masalah.

Peta masalah : Dari hasil FGD Tim *Maarif Institute* Gunungkidul, didapati temuan bahwa kepemilikan lahan pertanian petani Gunungkidul relatif kecil, dengan rata-rata lahan garapan seluas 0,25 Ha per petani. Hal ini menyebabkan hasil pertanian seringkali hanya dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri. Persoalan gagal panen juga kerap menjadi momok bagi petani Gunungkidul. Hama cukup sering menyerang seperti mentul, uret, wereng coklat. Hama mentul tiap tahun hampir pasti menyerang, dan terkadang menyebabkan puso/gagal panen.

Selain itu, terdapat juga temuan bahwa Ada petani yang sama sekali tidak mempunyai tanah, tetapi hanya menyewa tiap tahun. Hal ini sangat merugikan petani, karena jika tanam gagal maka modal hilang dan jadi bangkrut.

Sedangkan program yang sudah diberikan kepada petani (berdasarkan informasi dari petugas di 12 kecamatan), yakni:

Tabel.20. Program Khusus untuk petani

Kecamatan	Program
Nglipar	Dana talangan 1 unit= saprodi Rp. 7.850.000,-/desa. Subsidi pupuk
Ngawen	Bantuan benih jagung dan padi. Subsidi pupuk
Ponjong	Pemberian bibit Subsidi pupuk Pembuatan sumur bor/ pompa
Gedangsari	Bantuan pupuk dan bibit
semanu	Kelompok pembibitan
karangmojo	Pengembangan padi organik. Pengembangan padi beras merah “mandel”.
rongkop	Penanganan kacang tanah
tepus	Gaplek sebagai usaha baru
Paliyan	Bantuan pupuk Pinjaman modal penyuluhan
Panggang	Penyuluhan Pengadaan bibit Subsidi pupuk
Purwosari	Penyuluhan Bantuan pupuk Bantuan bibit
Saptosari	Penyuluhan Bantuan bibit

Permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh kelompok tani :

1. Faktor alam

- *Sulit untuk memprediksi musim*
(penanaman dilakukan dengan cara “ngawu-ngawu”, maka seringkali bibit yang disebar tidak tumbuh.
- *Jarak yang jauh*
untuk membeli bibit unggul. Namun jika pun ada harganya cukup mahal, sehingga terkadang petani lebih memilih menggunakan bibit biasa.
- *Ketersediaan lahan :*
– Masih kurang, bahkan banyak yang menyewa lahan dengan harga paling murah 400.000/tahun. Lahan bagus bisa sampai 1 juta lebih.

– Ada warga yang sama sekali tidak mempunyai tanah, tetapi hanya menyewa tiap tahun. Hal ini sangat merugikan petani, karena jika tanam gagal maka modal hilang dan jadi bangkrut.

Hasil terutama padi dirasa sangat kurang, untuk yang memiliki lahan sedikit, persediaan padi hanya bertahan 3-4 bulan, selebihnya membeli

- *Kepemilikan* lahan oleh petani rata-rata $\frac{1}{4}$ Ha
- *Sistem* irigasi teknik yang belum ada. Curah hujan yang rendah dan kemiringan lahan yang cukup tinggi dengan luasnya mencapai 6.639 Ha mengakibatkan petani agak kesulitan menggarap lahannya. Hasil pemantauan di lapangan masih sedikit petani yang menggunakan Terrasiring.

2. Fungsi dan keberadaan KUD

Pelayanan penyediaan pupuk dari KUD lambat (pada tahun 2006 ada kebijakan pemerintah kabupaten bahwa distribusi pupuk harus melalui KUD dengan RDKK). Tetapi persediaan pupuk di KUD sangat sedikit, stok pupuk minim. Padahal distributor dimodali oleh pemerintah sebesar 100 juta, tetapi pada kenyataannya stok di KUD tetap minim, bahkan tidak ada, jika ada permintaan dari warga, distributor baru membeli. Sehingga paling tidak membutuhkan waktu minimal 1 minggu. Padahal jika petani langsung mencari pupuk ke agen, untuk mendapatkan pupuk, hanya butuh waktu 1 hari dan kemudian bisa langsung dimanfaatkan. Selain itu ada indikasi “permainan” harga oleh oknum.

Jika KUD membeli pupuk dari luar maka distributor tidak mau melayani. Misalnya petani dari Kecamatan Rongkop ingin membeli pupuk di wilayah Kecamatan Semanu, maka petani tersebut hanya boleh membeli sebanyak 1 sak berisi 50 kg. Tidak semua koperasi berfungsi dan bisa menampung hasil produksi petani. Fungsi KUD yang tidak optimal, hanya terbatas sebagai penyedia pupuk, seharusnya KUD juga memfasilitasi penjualan hasil dan penyediaan bibit.

Tabel.21. Fungsionalisasi KUD

Kecamatan	Fngsional KUD
Nglipar	Tempat pembayaran listrik
Ngawen	Tidak ada
Ponjong	Tidak ada
Gedangsari	Simpan pinjam
semanu	Melayani pupuk Simpan pinjam Listrik Wartel
karangmojo	Tidak ada
rongkop	Pengadaan pupuk Simpan pinjam Swaserda
tepus	Simpan pinjam Distribusi pupuk
Paliyan	Simpan pinjam Pengadaan sembako
Panggung	Listrik Simpan pinjam
Purwosari	Tidak ada
Saptosari	Ada, tapi tidak berfungsi

(hasil survei *Maarif Institute Gunungkidul*)

3. Pasca panen

Permainan para tengkulak, menyebabkan harga pasar tidak ada standar. Sementara itu, para petani kesulitan mengakses langsung ke pasar, penjualan ke pasar sulit terkendala transport, sementara KUD tidak mampu memfasilitasi. Jika menjual ke kota, hasil penjualan banyak terpotong untuk ongkos transport. Selama ini penjualan petani masih dilakukan sendiri-sendiri, masih banyak yang belum terkoordinir.

4. Support pemerintah terhadap perkembangan pertanian

Pemerintah belum optimal dalam mengatasi kejenuhan dalam sektor pertanian ini. Beberapa masalah klasik tetap menjadi agenda tahunan, dan tidak ada pengembangan yang baru dari sektor ini. Beberapa dukungan dari pemerintah yang dirasa masih kurang adalah :

- modal untuk usaha tani dan pengolahan hasil pertanian
- prasarana pertanian

hanya ada 1 unit Pompa Air untuk satu Desa Hargomulyo dan yang dikelola oleh satu kelompok tani, penggunaannya pun disewakan 10.000/liter. Hasil penyewaan Pompa Air dikembalikan ke Kas desa sebesar 50%/semester, sisanya digunakan untuk operasional kelompok

- peningkatan wawasan & keilmuan petani
- kurangnya informasi harga pasaran dari hasil panen (HET) yang diumumkan secara resmi
- Keberadaan PPL dan kualitas PPL masih kurang. Selain itu metode PPL sangat minim penyampaian praktek langsung

5. Pemasaran dan Pengolahan hasil pasca panen'

Pengolahan pasca panen hanya dilakukan dengan pengeringan. Cara pengolahan hasil yang lain belum dilakukan, karena industri kecil tidak punya pasar. Industri rumah tangga yang diharapkan mampu menampung hasil petani ternyata terkendala pemasaran. Sistem pengolahan lahan maupun produksi hasil panen masih tradisional. Hasil produksi petani langsung diambil oleh tengkulak di lokasi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pasar untuk menjual hasil panen. Pemasaran hasil pertanian: pada saat panen nilai jual hasil pertanian turun tapi pada saat tertentu mengalami kelangkaan serta harga benih menjadi mahal.

6. Hama

- Hama cukup sering menyerang seperti mentul, uret, wereng coklat, karena lahan tidak diolah. hama mentul tiap tahun pasti menyerang, dan terkadang menyebabkan puso.
- Tidak adanya obat-obatan pembasmi hama.
- Tidak adanya perlengkapan yang memadai seperti semprotan dsb. Sebelum reformasi ada 1 buah alat semprot, tetapi karena kurang pemeliharaan, saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- Rumput tumbuh sangat lebat. Melebihi kapasitas tanam. Sehingga mengganggu tumbuhnya tanaman utama.

- Hama tikus menjadi momok yang sulit untuk diatasi oleh Petani Desa Hargomulyo. PPL menyarankan kepada petani
- untuk menggunakan obat dengan merk "Petrokum" seharga Rp 5000/kemasan, obat tersebut tersedia di Wonosari

7. Budaya

- Jika ada bantuan untuk membeli tenak, bantuan tidak dibelikan hewan ternak, tetapi dibelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
- Pengetahuan tentang teknologi masih rendah, hal tersebut dikarenakan mereka belum memiliki dan minimnya bantuan alat-alat teknologi pertanian
- Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan ketidaktahuan mereka terhadap efek yang ditimbulkan menunjukkan
- kurang kritisnya dan rendahnya kesadaran petani terhadap keberlangsungan kesuburan lahan mereka.
- Rendahnya SDM Petani dan kurangnya informasi serta sosialisasi juga berakibat mereka tidak mengetahui prosedur pengajuan, penerimaan bantuan dan subsidi dari pemerintah
- Masyarakat tani belum terbiasa untuk melakukan analisa usaha pertanian.
- Etos kerja petani rendah sehingga waktu luang tidak dimanfaatkan, mereka jarang yang memiliki kerja sampingan
- Ketrampilan yang dimiliki hanya bercocok tanam sehingga untuk pemenuhan kebutuhan relatif kurang

Berikut ini rekap permasalahan yang dirasakan para kelompok tadi sebagai kendala pertanian di 12 kecamatan:

Tabel.22..Kendala Pertanian di 12 Kecamatan

Kecamatan	Kendala Pengembangan Pertanian
Nglipar	Iklm Sumber air terbatas Kondisi jalan di 3 desa terpencil Pertanian tergantung pada irigasi
Ngawen	masalah pengairan
Ponjong	Masalah air/ sumur pompa jika rusak
Gedangsari	Masalah air Medan / lokasi lahan sulit dijangkau
semanu	Musim Curah hujan
karangmojo	Modal kurang Harga pasar anjlok Curah hujan
rongkop	Secara geografis sulit Mata air tidak ada
tepus	Musim
Paliyan	Pupuk langka/ mahal (distribusi sulit). Musim kemarau Modal pemasaran
Panggang	Masalah air
Purwosari	Harga pupuk tinggi (menunggu distributor) Pupuk mahal Transportasi sulit kekeringan
Saptosari	Swasta ditunjuk sebagai pengecer Modal Pemasaran Hama

(hasil survei *Tim Maarif Institute Gunungkidul*)

3.1.2 Kemiskinan dan Kesehatan

A. Anggaran Kesehatan Pemerintah Belum Bisa Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar di bidang kesehatan, dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran untuk kesehatan. Tabel berikut memperlihatkan berapa alokasi anggaran kesehatan dari masing-masing daerah di Kabupaten/Kota di DIY.

Tabel.23. Rasio belanja Kesehatan terhadap total belanja APBD Kabupaten/Kota Prop.DIY tahun 2006

No	Wilayah	Total Anggaran Kesehatan (Rp)	Rasio thd.total belanja APBD
1	Bantul	33,371,457,400	6,00%
2	Gunungkidul	34,567,244,026	4,70%
3	Kulonprogo	27,550,968,857	5,83%
4	Kota Jogjakarta	30,629,526,973	5,31%

Sumber: Analisis iDEA, 2006

Dari data di atas terlihat bahwa Gunungkidul walaupun secara nominal memberi alokasi dana terbesar (Rp. 34,56 M), namun jika dibandingkan dengan prosentase alokasi dana pada belanja APBD, Gunungkidul menempati posisi terendah dibanding daerah lain di DIY.

Padahal, retribusi kesehatan masih menjadi primadona penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Gunungkidul, kondisi ini sungguh sangat ironis. Ironis karena justru orang/warga yang sakit 'menyumbang' ke kas Pemkab dalam porsi terbesar dibanding sumber pendapatan asli daerah yang lain.

Tabel.24. Daftar Sumber-sumber Terbesar PAD Gunungkidul tahun 2006

No	Juara PAD	Jumlah (Rp)
1	Retribusi kesehatan dan RSUD	6,873,750,000
2	Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah	4,280,562,500
3	Retribusi pelayanan pasar	2,745,707,800

Sumber: APBD Gunungkidul, 2006

Adapun pembelanjaan dalam bidang kesehatan dalam alokasi belanja APBD Gunungkidul 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel.25. Belanja Kesehatan dalam APBD Gunungkidul tahun 2006

No	Juara PAD	Jumlah (Rp)
1	bantuan pengobatan gakin dan pelayanan SKTM	54,000,000
2	bantuan pengobatan Gakin	250,000,000
3	Pelatihan kader posyandu untuk 544 posyandu	177.130.000
4	Pengembangan posyandu	23.500.000
5	Pembinaan posyandu lansia	20.220.000

Sumber: APBD Gunungkidul, 2006

Posyandu, sebagai sebuah layanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat, juga kurang mendapat perhatian dalam APBD. Hal tersebut juga dikeluhkan warga dalam FGD yang digelar di Rongkop, Gedangsari dan Tanjungsari. Apalagi layanan kesehatan lewat Puskesmas juga kurang dapat diakses karena problem jarak dan jam layanan yang terbatas. Di Gunungkidul belum semua Puskesmas menyediakan layanan rawat inap.

B. Diskriminasi Layanan dan Layanan Kurang Prima bagi Warga Miskin

Selama ini warga miskin memperoleh layanan kesehatan gratis dengan menunjukkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang didapat di Kantor Kecamatan. Namun demikian, dalam FGD terungkap bahwa warga enggan menggunakan SKTM karena harus menempuh prosedur birokrasi yang memerlukan waktu (mulai dari RT, Dukuh, Desa dan Kecamatan). Sementara itu layanan untuk pasien dengan SKTM dirasakan kurang layak, sering mendapatkan diskriminasi.

Untuk melihat gambaran pemenuhan pelayanan kesehatan warga, MI menggunakan Survey yang dilakukan dengan menggunakan questioner dengan institusi kecamatan terkait. Selain survey (pendekatan kuantitatif), riset ini juga menggunakan wawancara mendalam sebagai informasi lain yang akan dianalisis (dengan pendekatan kualitatif). Berdasarkan hasil survey, berikut bisa dilihat gambaran kondisi pelayanan kesehatan dalam persepsi warga masyarakat dengan menggunakan variabel (Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu, Dokter Praktek Pribadi, Bidan Desa, Mantri Desa):

Tabel.26. Gambaran Kondisi Pelayanan Kesehatan

No.	KECAMATAN	KATEGORI			
		BAIK	SEDANG	CUKUP	BURUK
1	Panggung				√
2	Purwosari				√
3	Paliyan				√
4	Saptosari				√
5	Tepus			√	
6	Rongkop			√	
7	Semanu			√	
8	Ponjong		√		
9	Karangmojo			√	
10	Gedangsari			√	
11	Nglipar	√			
12	Ngawen				√

Sumber; Hasil Riset Lapangan MI-Gk

Tabel.27. SURVEY pelayanan kesehatan dengan menggunakan variabel (Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu, Dokter Praktek Pribadi, Bidan Desa, Mantri Desa)

No	Kecamatan	JENIS PUSKESMAS			TENAGA MEDIS			Penduduk	Rerata Penduduk Sakit
		I	P	K	dokter	bidan	perawat		
1	Paliyan	1	5	1	3	5	7	32.076	12.830
2	Panggung	2	4	2	6	7	11	28.389	11.355
3	Purwosari	1	3	1	3	5	4	22.157	8.863
4	Saptosari	1	6	1	2	5	8	37.196	14.878
5	Semanu	2	6	3	4	8	12	58.818	23.527
6	Karangmojo	2	9	2	3	8	11	57.049	22.820
7	Rongkop	1	5	1	3	5	8	32.495	12.998
8	Tepus	2	4	2	5	7	12	39.034	15.614
9	Nglipar	1	4	1	5	11	9	35.324	14.130
10	Ngawen	2	6	2	6	8	12	36.154	14.462
11	Ponjong	2	12	2	7	9	19	56.789	22.716
12	Gedangsari	1	6	2	1	8	9	40.529	16.212
	TOTAL	18	70	20	48	86	121	476.009	190.405

Sumber : data olahan Maarif Institute

-

Ket I = Induk
P = Pembantu
K = Keliling

Tabl.28. Pelayanan Kesehatan di 12 Kecamatan Wilayah Survey

No.	Kecamatan	TENAGA MEDIS			Rerata Penduduk Sakit	Rasio Pasien dan Tenaga Medis
		dokter	Bidan	perawat		
1	Paliyan	3	5	7	12.83	855
2	Panggung	6	7	11	11.355	473
3	Purwosari	3	5	4	8.863	74
4	Saptosari	2	5	8	14.878	992
5	Semanu	4	8	12	23.527	980
6	Karangmojo	3	8	11	22.82	1037
7	Rongkop	3	5	8	12.998	812
8	Tepus	5	7	12	15.614	651
9	Nglipar	5	11	9	14.13	565
10	Ngawen	6	8	12	14.462	556
11	Ponjong	7	9	19	22.716	649
12	Gedangsari	1	8	9	16.212	901

Sumber : data olahan Maarif Institute

Jumlah penduduk sakit dalam tahun 2005 adalah 235.235 yakni 30,99% dari total penduduk (758.885 jiwa). Untuk ketercukupan tenaga medis dalam batas minimal sudah dalam batas Cukup (dengan rata-rata pasien terlayani oleh 1 orang tenaga medis setiap hari dalam satu tahun adalah 0-3 orang).

C. Akses Kesehatan:

Akses kesehatan hampir dapat dirasakan oleh semua kecamatan terkecuali beberapa wilayah seperti di kecamatan Ngawen. Di kecamatan Ngawen ini terdapat beberapa dusun yang masih kurang mendapat akses kesehatan seperti ASKESKIN. Dusun meliputi: Dusun Gambar, Dusun Kampung, Dusun Gambarsari, Buyutan, dan Dusun Pandansari. Sementara itu, dalam Diskusi Warga, ada seorang peserta dari Girisubo yang mengungkapkan, bahwa sebuah desa di ujung tenggara Kecamatan Girisubo (Desa Songbanyu) yang berbatasan dengan Wonogiri, belum memiliki fasilitas layanan kesehatan, Puskesmas Pembantu belum ada, Puskesmas keliling pun hanya menghampiri desa tersebut satu kali dalam sebulan.

D. Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Untuk Kategori Miskin

1. Nglipar

- Pelayanan: Askeskin, Pelayanan Gratis di Puskesmas
Dusun yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan: 3 dusun
Kendala : daerah sulit dijangkau kendaraan
2. Ngawen
Pelayanan: Askeskin, pelayanan gratis di puskesmas
Dusun yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan: 6 dusun
Kendala : daerah sulit dijangkau kendaraan
 3. Ponjong
Pelayanan: Askeskin, SKTM (surat keterangan tidak mampu)
Dusun yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan: tambak romo
Kendala : daerah sulit dijangkau kendaraan
 4. Gedangsari
pelayanan : Askeskin, SKTM (surat keterangan tidak mampu)
terdapat 2 dusun yang belum mendapatkan akses pelayanan: desa mertelu, desa seruh
 5. Paliyan
Pelayanan: Askeskin
 6. Panggang
Pelayanan: pelayanan gratis di puskesmas, SKTM
 7. Purwosari
Pelayanan: Askeskin, SKTM (surat keterangan tidak mampu)
 8. Saptosari
pelayanan : SKTM (surat keterangan tidak mampu)
 9. Semanu
Pelayanan: Askes gakin, jamkesos, SKTM
 10. Karangmojo
Pelayanan: Askeskin, pelayanan gratis di puskesmas
terdapat program klinik sehat yaitu layanan konsultasi bagi warga berupa konsultasi psikologi, lingkungan hidup, dsb di puskesmas induk
 11. Rongkop

Pelayanan: Askeskin, SKTM (surat keterangan tidak mampu)

Dusun yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan: tambak romo

Kendala : daerah sulit dijangkau kendaraan

12. Tepus

pelayanan : Askeskin, SKTM (surat keterangan tidak mampu) tiap hari

melayani 3-5 orang

E. Pengadaan Sarana MCK (Mandi Cuci Kakus)

Kondisi kesehatan masyarakat juga bisa diukur dari kepemilikan dan ketercukupan sarana MCK (mandi, cuci kakus) untuk melihat budaya hidup sehat masyarakat.

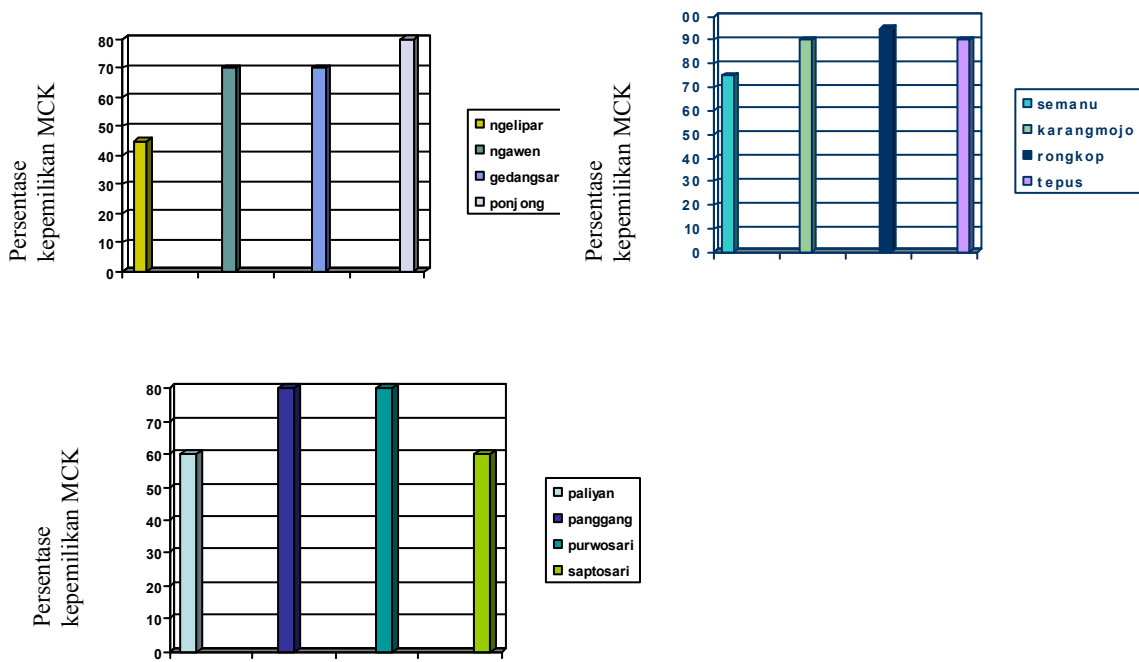
Tabel. 29. Kepemilikan Dan Ketercukupan Sarana Mck Masyarakat

No.	Kecamatan	Prosentase
1	Panggung	80%
2	Purwosari	60%
3	Paliyan	60%
4	Saptosari	60%
5	Tepus	90%
6	Rongkop	95%
7	Semanu	75%
8	Ponjong	80%
9	Karangmojo	90%
10	Gedangsari	70%
11	Nglipar	45%
12	Ngawen	70%

Survey Tim MI-GK tentang fasilitas/sarana MCK

Berdasar hasil survei yang dilakukan *Maarif Institute for culture and humanity* pada 12 kecamatan selama 3 bulan (November 2006 – Januari 2007), maka bisa dilihat prosentase penggunaan MCK oleh masyarakat di 12 Kecamatan tersebut di bawah ini:

Gambar.2. prosentase penggunaan MCK oleh masyarakat pada 12 Kecamatan



Jika dilihat dari aspek hidup sehat dengan indikator pengadaan MCK, maka pengadaan MCK terbanyak di kecamatan Ponjong 80%. Untuk Ngawen dan Gedangsari pengadaan MCK baru mencapai 70%. Penting untuk diperhatikan adalah kecamatan Nglipar.

Kecamatan Nglipar, untuk pengadaan MCK baru mencapai 45 %. Sisanya masih menggunakan MCK semi permanen. Kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat di kecamatan ini masih rendah. Di Kecamatan Rongkop pembuatan MCK telah mendapat bantuan dari pemerintah. Di Karangmojo, terdapat program PKK “monitoring rumah sehat” secara rutin. Ada perubahan perilaku warga, sehingga timbul kesadaran pentingnya membuat MCK. Kecamatan Paliyan dan Saptosari pengadaan MCK baru mencapai 60 %.

F. Kesulitan Air Biaya Hidup Mahal

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kelangkaan air menjadi problem menahun di Gunungkidul. Dari survey lapangan Tim *Maarif Institute*

Gunungkidul, mayoritas warga di hampir seluruh wilayah Gunungkidul, mengandalkan pemenuhan air dari PDAM, dan tampungan air hujan.

Pada musim kemarau, mayoritas penduduk harus membeli air dengan mobil tangki PDAM secara tanggung renteng. Air satu tangki (kapasitas 5.000 liter) pada musim kemarau seharga Rp. 70-100 ribu (tergantung jarak lokasi) untuk maksimal memenuhi kebutuhan air selama 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan penduduk harus menambah anggaran belanja minimal Rp 150 ribu untuk keperluan air.

Berdasarkan survey pengadaan air bersih yang dilakukan (berdasarkan ketercukupan pengadaan air bersih) dengan menggunakan ketercukupan sumur, PDAM, mata air, beli dari swasta dan penampungan air hujan sebagai indikator untuk menilai dari cukup/tidak cukupnya prasarana air di 12 Kecamatan di Gunungkidul. Hasil survei tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel.30.
Hasil Survey MI-GK tentang pengadaan air bersih dengan menggunakan variabel (Sumur PDAM Mata Air Beli swasta Penampungan Air Hujan)

No.	Kecamatan	Ketercukupan Air	
		Cukup	Tidak Cukup
1	Panggung	√	
2	Purwosari		√
3	Paliyan		√
4	Saptosari		√
5	Tepus	√	
6	Rongkop		√
7	Semanu	√	
8	Ponjong	√	
9	Karangmojo	√	
10	Gedangsari		√
11	Nglipar	√	
12	Ngawen	√	

Penilaian cukup dan tidak cukupnya sarana air bersih yang dihasilkan oleh Tim *Maarif Institute* Gunungkidul dilakukan dengan menjadikan analisa kuantitatif sebagai penilaian ketercukupan. Temuan di lapangan bisa dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel.31. Hasil Survey Ketercukupan Sarana Air Bersih

Sumber Air Bersih	Nglipar	Ngawen	Ponjong	Gedangsari
Sumur	√	√	√	√
PDAM	√	-	√	-
Mata Air	√	√	√	√
Beli Swasta	-	√	-	-
Penampungan Air Hujan	√	√	√	√

Sumber air bersih	Paliyan	Panggung	Purwosari	Saptosari
Sumur	-	-	-	-
PDAM	√	√	-	-
Mata Air	√	√	√	√
Beli swasta	√	√	√	√
Penampungan Air Hujan	√	√	√	√

Sumber air bersih	Semanu	Karangmojo	Rongkop	Tepus
Sumur	√	√	-	-
PDAM	√	√	√	√
Mata Air	√	√	-	√
Beli swasta	√	√	√	√
Penampungan Air Hujan	√	√	√	√

Setiap warga di kecamatan Nglipar ini mempunyai air bersih yang sudah cukup memadai dan mencukupi, yaitu sumur, baik sumur bor maupun sumur gali, mata air, penampungan air hujan, PDAM, dan juga mendapatkan bantuan air gratis dari pemerintah kabupaten maupun dari PMI. Ngawen juga mendapatkan air bersih yang mencukupi baik dari alam maupun pemerintah kabupaten.

Sedang untuk PDAM, sudah ada salurannya tetapi tidak berfungsi sama sekali. Untuk Gedangsari kebutuhan air bersih tercukupi secara baik oleh alam, mesti untuk saluran PDAM belum ada. Untuk Purwosari kebutuhan air bersih masih dirasa mencukupi. Kecuali pada musim kemarau karena sumber air yang ada digunakan warga kecamatan yang lain. Di Kecamatan Paliyan juga masih rentan terutama pada musim kemarau kebutuhan air bersih dirasa sangat kurang.

3.1.2. Kemiskinan dan Pendidikan

A. Anggaran Pendidikan Pemerintah Belum Bisa Memenuhi Kebutuhan Sektor Pendidikan

Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar di bidang pendidikan, dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan berapa alokasi anggaran pendidikan dari masing-masing daerah di Kabupaten/Kota DIY.

Tabel.32. Rasio belanja pendidikan terhadap total belanja APBD

Kabupaten/Kota Prop.DIY tahun 2006

No	Wilayah	Total Anggaran Pendidikan (Rp)	Rasio thd.total belanja APBD
1	Bantul	265,801,329,500	44.79%
2	Gunungkidul	155,799,316,391	30.02%
3	Kulonprogo	110,520,344,355	23.41%
4	Sleman	308,562,732,608	42.65%
5	Kota Jogjakarta	175,801,734,434	34.77%

Sumber: Analisis iDEA, 2006

Sementara dalam APBD Gunungkidul tahun 2006, anggaran ini dianggarkan sebesar Rp 217.530.408.569,12 (41,92% dari APBD). Dari data di atas terlihat bahwa Gunungkidul hanya lebih baik dari Kulon Progo (keduanya merupakan 2 kabupaten kantong kemiskinan di DIY).

Dalam penelusuran terhadap APBD Gunungkidul 2006, didapati temuan dalam sektor pendidikan, terdapat alokasi dana bantuan pembangunan gedung TK sebesar Rp. 1,25 milyar. Jika dilihat peruntukannya, bantuan dana sebesar Rp.1,25 milyar untuk pembangunan gedung TK dirasa terlalu besar, mengingat TK belum terlalu perlu fasilitas gedung yang megah. Hal yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dan representatif demi peningkatan kualitas siswa.

Sementara itu dalam PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Gunungkidul dalam belanja APBD 2006 mengalokasikan dana sebesar Rp. 56,4 juta. Dari hasil

FGD di kecamatan Rongkop warga mengungkapkan bahwa hal yang paling penting tentang PADU adalah tersedianya pendidikan yang murah sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam FGD tersebut juga terungkap bahwa sarana yang lain seperti pemenuhan gizi anak dan layanan kesehatan (posyandu) sebagai penunjang peningkatan kualitas anak belum begitu mendapat perhatian.

B. Minimnya Sarana Pendidikan

Rendahnya kualitas SDM, khususnya terkait pendidikan dan persoalan kemiskinan menjadi problem yang berjaln-kelindan di Gunungkidul. Cakupan wilayah geografis yang luas, terbatasnya anggaran membuat layanan pendidikan belum bisa diakses oleh seluruh warganya. Hal ini tergambar dari data jumlah sekolah dan persebarannya di wilayah Gunungkidul.

Tabel.33. Jumlah Sekolah Negeri Di Gunungkidul

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMKN+S
1	Panggung	20	2	1	-
2	Purwosari	14	1	-	-
3	Paliyan	15	2	-	-
4	Saptosari	18	2	-	1
5	Tepus	21	3	-	1
6	Tanjungsari	15	2	1	1
7	Rongkop	22	1	1	1
8	Girisubo	18	2	-	-
9	Semanu	34	3	1	1
10	Ponjong	35	4	-	1
11	Karangmojo	39	3	1	2
12	Wonosari	38	4	2	7
13	Playen	37	4	2	4
14	Patuk	24	4	1	1
15	Gedangsari	25	3	-	1
16	Nglipar	23	3	1	1
17	Ngawen	20	4	-	1
18	Semin	35	3	1	1
TOTAL		453	50	12	24

Sumber: Dinas Pendidikan Gunungkidul, 2006

Terlihat bahwa daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan tidak memiliki cukup sarana pendidikan. Biaya tak langsung, seperti biaya

transportasi merupakan kendala utama bagi masyarakat di kawasan kantong kemiskinan untuk menempuh sekolah lanjut. Apalagi, dari data di atas terlihat bahwa di wilayah tersebut, jumlah sekolah lanjut (SMP, SMA/K) masih sangat minim.

Selain itu, gedung sekolah yang hampir roboh, guru yang jarang datang, buku-buku pelajaran yang mahal, sekolah lanjutan yang tidak ada merupakan beberapa persoalan yang diungkap dalam FGD di tiga kecamatan basis kemiskinan (Rongkop, Gedangsari dan Tanjungsari).

Dari *pre-elementary study* yang dilakukan terdapat korelasi antara tingkat penghasilan dengan latar belakang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat penghasilan, meskipun secara umum mereka masih masuk dalam kategori miskin. Hal ini juga bisa dilihat dari Ini membuktikan bahwa dalam jangka panjang pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

C. Banyaknya Kasus Putus Sekolah Alasan Biaya

Dalam survey Tim Maarif Gunungkidul, diperoleh data bahwa angka putus sekolah dengan alasan biaya relatif tinggi di sejumlah kecamatan, diantaranya di Gedangsari, Tepus, Rongkop, Girisubo dan Tanjungsari. Dalam diskusi forum warga terungkap bahwa alasan putus sekolah adalah kendala ekonomi, minat, jarak ke sekolah yang relatif jauh sehingga menambah ongkos untuk transportasi.

Di kecamatan Tepus ada warga yang mengungkapkan, untuk sekolah di SMA luar kecamatan, setidaknya dibutuhkan biaya Rp. 10 ribu per hari untuk transportasi. Di kecamatan Semanu, pada tahun ajaran 2006 jumlah anak putus sekolah (SD, SMP) mencapai 87 anak. Kendala yang terungkap adalah faktor ekonomi (biaya), dan tuntutan orangtua untuk bekerja.

D. Masalah dalam Pelayanan Pendidikan

Di sektor pendidikan ini ada beberapa variabel yang dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap kualitas/mutu pendidikan di Gunungkidul.

Tabel.34. Data Jumlah kelas, peserta didik, dan tenaga pengajar institusi pendidikan formal di Gunungkidul tahun 2005/2006

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Status Sekolah Negeri / Swasta	Jumlah Murid	Jumlah Guru/Dosen	Jumlah Kelas	Rasio Peserta Didik terhadap Pendidik	Rasio Siswa terhadap Kelas
1	TK		10.206	805	678	13	15
2	SD	N	56.158	3.825	2.802	15	20
		S	4.915	408	331	12	15
3	SLTP	N	18.599	1.434	536	13	35
		S	6.471	754	230	9	28
4	SMU	N	4.670	494	153	9	31
		S	1.547	314	61	5	25
5	SMK	N+S	9.433	924	294	10	32
6	RA	N+S	7.474	837	457	9	16
7	MI	N+S	5.437	793	437	7	12
8	MT	N+S	4.806	564	159	9	30
9	MA	N+S	687	118	24	6	29
10	PT	S	765	85	-	9	-

Sumber : data olahan *Maarif Institute* Gunungkidul

Dari data di atas bisa dilihat untuk gambaran tenaga pengajar (secara kuantitas) sudah mencukupi dengan rasio peserta didik terhadap tenaga pengajar rata-rata 1: 10. Untuk gambaran ketercukupan ruang kelas juga sudah memadai (secara uantitas) dengan rasio murid terhadap kelas rata-rata 1: 24.

Jika dilihat peta masalah pendidikan di Gunungkidul, maka dapat diidentifikasi beberapa hal di bawah ini :

3.2. Peta masalah dan Alternatif Pemecahannya

3.2.1 Peta Masalah

A. Kinerja guru yang tidak optimal.

Salah satu diantaranya disebabkan oleh tempat tinggal guru yang jauh dari sekolah (di luar wilayah Gunungkidul) dan profesi guru hanya dijadikan batu loncatan untuk mendapat SK, selanjutnya para guru kembali ke daerah

asalnya, akibatnya Gunungkidul kekurangan tenaga guru. Sebagai contoh SD Kanigoro masih sering terjadi guru yang datang terlambat karena sebagian guru merupakan tenaga *lajon* dari Bantul dan Sleman. Kinerja guru yang tidak optimal juga disebabkan oleh profesi guru hanya dijadikan batu loncatan untuk mendapat SK, selanjutnya para guru kembali ke daerah asalnya, akibatnya Gunungkidul kekurangan tenaga guru.

B. Kultur dan cara berpikir masyarakat

Masyarakat masih belum memahami arti pentingnya pendidikan. Dampaknya adalah minimnya angka partisipasi sekolah, khususnya pada tingkat menengah atas (20%). Jumlah SMK yang hanya 1 unit dirasa masih perlu ditambah mengingat diperlukannya angkatan kerja yang bisa siap pakai. Tingkat SMP pelaksanaan pendidikan dianggap oleh masyarakat sudah mencukupi hanya saja pasca proses kelulusan banyak anak tamatan SMP yang putus sekolah disebabkan minat kurang dan adanya stigma sekolah di lingkup kecamatan Tanjungsari kalah (*Sekolah Ndeso*) dibanding sekolah di Wonosari (alasan prestise). Sementara dukungan biaya untuk bersekolah di luar kecamatan relatif tinggi yang tidak dapat diikuti oleh kemampuan orang tua.

C. Pendidikan Luar Sekolah

Permasalahan pendidikan luar sekolah di Gunungkidul terutama dirasakan oleh PKBM. Permasalahan di PKBM meliputi : (a) Tutor (kualitas, spesialisasi, minimnya dana kesejahteraan, tutor sebagai pekerjaan sampingan, pelatihan tutor yang frekuensinya sedikit&tidak efektif); (b) Sarana&prasarana (status gedung pinjaman, dana sangat sedikit dan hanya bersumber dari Diknas); (c) Siswa belajar (kelonggaran untuk tingkatan semua kelas, warga yang masuk dalam kategori siswa PKBM adalah warga umur produktif yaitu maksimal berumur 40 tahun.

Hal ini berakibat pada perubahan sistem pembelajaran, karena dalam usia yang relative tua, siswa lebih sulit untuk menerima pelajaran, (d) kurikulum

(belum terstruktur dan terencana secara baik, Kelompok Kerja Guru (KKG) tidak ada, sehingga target-target pembelajaran tidak ada); manajemen pengelolaan PKBM (belum professional, hanya dikelola oleh ketua saja); (e) PAUD (TK vs PAUD, kader PAUD belum professional, sosialisasi kurang).

Sementara itu, beban atas kasujs buta huruf yang mencapai lebih dari 48.000 orang (untuk buta huruf mutlak) dan sekitar 9.000 penduduk dalam kisaran usia 15-44 tahun menyebabkan konsentrasi anggaran pendidikan juga banyak yang terserap untuk kegiatan PBS (Pemberantasan Buta Aksara).

D. Aksesibilitas

Letak SD tidak menyebar, Sulitnya transportasi sehingga sebagian besar siswa jalan kaki, rata-rata 5 km, SMK baru berdiri tapi kekurangan murid karena jurusan tidak diminati, Perpustakaan ada tapi tidak memadai karena buku tidak lengkap, Alat olahraga kurang, Perbandingan guru dan murid. SD 1:30, SMP 1:42. Ada program BOS, tetapi banyak yang tidak sekolah karena pesimis dengan sistem pendidikan indonesia, Daya jangkau lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah karena lingkungan dan kesadaran mengenai pendidikan masih sangat rendah. SD ke SMP sebagian besar melanjutkan, tetapi dari SMP ke SMA sangat rendah karena menganggap pendidikan tidak penting berkaca pada banyaknya lulusan SMA yang menganggur.

E. Mutu Pendidikan

Untuk jenjang pendidikan SD dirasa sudah memenuhi standar kelulusan 100. Sementara untuk jenjang SMP banyak yang tidak lulus karena keberatan dengan dengan sistem pendidikan terutama sistem kelulusan. Dari penelusuran Tim *Maarif Institute* Gunungkidul, persoalan kesenjangan mutu pendidikan terutama terjadi antara sekolah-sekolah yang berada di Wonosari dengan sekolah-sekolah yang berada di luar Wonosari. Beberapa variabel yang mempengaruhi hal itu diantaranya adalah: kualitas guru, manajemen sekolah,

ketersediaan dan/atau kecukupan sarana penunjang pendidikan, serta dukungan lingkungan dan/atau masyarakat.

F. Komite sekolah

Komite Sekolah tidak berfungsi optimal diantaranya tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan sekolah, hanya terlibat dalam pengesahan (bukan dalam proses penyusunan) anggaran di forum rembug komite sekolah, namun pasca itu tidak terlibat sama sekali.

G. Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah yang rendah dikarenakan keterbatasan ekonomi

3.2.2 Alternatif pemecahan Masalah :

3.2.2.1. Pendidikan Gratis

Dengan melihat pentingnya pendidikan bagi warga Negara, Yogyakarta memiliki potensi pengembangan pendidikan lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Saat ini banyak upaya di berbagai daerah untuk berusaha menyelenggarakan pendidikan gratis bagi warganya. Di wilayah DIY belum ada kabupaten maupun kota yang sudah melakukan pemberian pendidikan gratis di tingkat dasar maupun menengah. Untuk porsi anggaran yang 20% juga belum ada yang mencapai angka sebesar itu. Namun demikian perlu diberi apresiasi yang besar terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membuat desain kebijakan pendidikan (sekolah) gratis mengingat rangking PAD nya adalah yang terendah diantara kabupaten lain di DIY. Ini menandakan adanya *political will* dan *good will* dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menegakkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pendidikan gratis di kabupaten Gunungkidul ada beberapa hal yang perlu menjadi pokok bahasan, yakni :

A. UNIT COST (UC)

Diperlukan adanya perhitungan dan pertimbangan berberapa aspek. Pertimbangan tersebut anatara lain:

1. Jumlah siswa di kabupaten Gunungkidul
2. Tingkat pertumbuhan penduduk di Gunungkidul
3. Anggaran dari daerah dan sharing pusat serta provinsi
4. Potensi pendapatan daerah

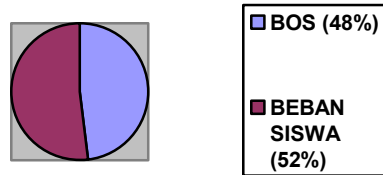
Untuk menentukan UC siswa setidaknya da 3 cara yang bisa ditempuh. *Pertama*, menginventarisir semua kebutuhan siswa dalam proses KBM (kegiatan belajar mengajar). *Kedua*, melakukan survey atau penelitian tentang UC siswa di suatu daerah. Penelitian dapat menggunakan RAPBS/APBS atau laporan realisasi anggaran APBS. *Ketiga*, data tentang kecenderungan umum UC setiap jenjang pendidikan yang dimiliki dinas pendidikan masing-masing tempat. Hal ini dimungkinkan karena banyak data tersedia di dinas. Berikut adalah estimasi UC dalam setiap jenjang pendidikan ;

B. SD dan SLTP

Untuk menentukan UC SD dan SLTP berikut dilakukan dengan cara penentuan kedua, yakni dengan survey terhadap rerata UC pada data RAPBS. Dari hasil survey (2006) yang dilakukan bersama oleh Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY, Tim Anti Korupsi Muhammadiyah (TKAK Muhammadiyah), Jangkep, dan LAPY terhxadap 100 RAPBS se-propinsi DIY menunjukkan bahwa perbandingan antara Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan biaya komite yang merupakan beban siswa (termasuk berbagai pungutannya) adalah sbb :

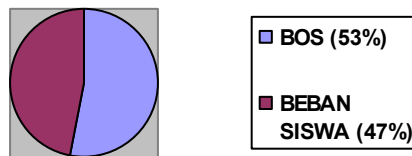
Gambar.3.
Perbandingan Dana BOS dengan Dana yang di Bayar Siswa SD

**PERBANDINGAN DANA BOS
DENGAN DANA YANG DIBAYAR
SISWA SD SE DIY**



Gambar.4.
Persentase Dana BOS dengan Dana yang dibayar Siswa SLTP

**PERSENTASE DANA BOS DENGAN
DANA YANG DIBAYAR SISWA SLTP
SE DIY**



Dari diagram bisa dilihat bahwa dana BOS belum mampu memenuhi seluruh biaya operasional pendidikan di sekolah. Pada jenjang SD/MI dana yang didapat adalah sebesar Rp 235.000,- per siswa per tahun. Sedangkan pada jenjang SLTP BOS sebesar Rp 324.500,- per siswa per tahun. Jika total dana BOS dan tambahan dana dari siswa dianggap sebagai rerata UC, maka dapat ditentukan :

1. Untuk SD/MI, UC per siswa per bulan adalah Rp 43.245,-
2. Untuk SLTP, UC per siswa per bulan adalah Rp 54.082,-

C. SMA dan SMK

Dasar penentuan UC SMA dan SMK berikut, jika ditilik dari pengantar di atas, merupakan cara yang dihasilkan dari pendekatan yang ketiga yakni rerata kebutuhan unit cost yang diperoleh dari informasi di Dinas Pendidikan Propinsi DIY, yani :

1. Untuk SMA, UC per bulan adalah Rp 150.00,-
2. Untuk SMK, UC per bulan adalah Rp 300.00,-

Berikut adalah tabel penghitungan rasionalisasi kebutuhan anggaran pendidikan gratis di Kabupaten Gunungkidul jika menggunakan analisis survey BOS-Beban siswa:

Tabel.35. Penghitungan Rasionalisasi Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis di Kabupaten Gunungkidul

Skh	Jmlh siswa*	UC-BOS **	bln	Kebutuhan	TOTAL	APBD 06-07	%
SDN	55.043	23.745	12	15.683.852.420			
SMPN	19.702	27.082	12	6.402.834.768			
SMAN	4.830	150.000	12	8.694.000.000			
SMKN	4.044	300.000	12	14.558.400.000			
					45.339.187.188	517.621.525.090	8,76%

Keterangan :

* Sumber dari data Dinas Pendidikan Propinsi DIY terhadap siswa tahun ajaran 2006/2007

** UC-BOS untuk SD/MI : $43.245 - 19.500 = \text{Rp } 23.745,-$
 UC - BOS untuk SMP : $54.082 - 27.000 = \text{Rp } 27.082,-$

Berdasarkan analisis *Maarif Institute for Culture and Humanity* bersama Tim Pokja Pendidikan gratis DIY, kami mencoba membuat simulasi anggaran untuk pengeluaran pendidikan gratis. Dengan asumsi SPP untuk SD,SMP,SMU negeri adalah Rp.50.000,-,Rp.75.000,- dan Rp.100.000,- sedangkan jumlah siswa diambil dari data dinas pendidikan provinsi DIY tahun 2004/2005. Maka untuk wilayah Gunungkidul dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel.36. Simulasi Anggaran Untuk Pengeluaran Pendidikan Gratis

Kabupaten	Jumlah Siswa SD	SPP/bln	Jumlah Siswa SMP	SPP/bln	Jumlah Siswa SMU	SPP/bln
Gunungkidul	57.995	50.000	19.809	75.000	5.229	100.000
Total Kebutuhan per bulan dan per tahun					4.908.325.000 (per bulan)	58.899.900.000 (per tahun)

Apabila pemerintah daerah Gunungkidul memiliki perencanaan pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan menengah negeri dulu maka didapat angka seperti diatas. Untuk angka swasta di DIY sebagai berikut dengan jumlah siswa yang datanya berasal dari dinas pendidikan provinsi DIY dan dengan asumsi biaya pendidikan SD-SMU sama dengan sekolah negeri dihasilkan sebagai berikut:

Tabel.37. Simulasi Anggaran Untuk sekolah swasta di DIY

Kabupaten	Jumlah Siswa SD	SPP/bln	Jumlah Siswa SMP	SPP/bln	Jumlah Siswa SMU	SPP/bln
Gunungkidul	5.836	50.000	6.608	75.000	1.554	100.000
Total Kebutuhan per bulan dan per tahun					942.800.000 (per bulan)	11.313.600.000 (per tahun)

D. ALTERNATIF ANGGARAN

Anggaran yang digunakan untuk mendanai pendidikan gratis dapat didapatkan dari berbagai sumber antara lain:

1. APBD
2. Sumber yang rutin dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan gratis adalah APBD dengan mengalokasikan sebesar kebutuhan anggaran. Apabila dari anggaran alokasi pendidikan belum memenuhi target kebutuhan maka share budget dapat dinaikan dari sebelumnya dengan anggaran total yang sama berarti ada pengurangan pada bidang lain. Cara lainnya dengan meningkatkan total APBD sehingga jumlah alokasi untuk pendidikan juga akan bertambah, dapat juga dengan efisiensi dan kelebihan anggaran. Selain itu penambahan dana dari pusat berupa BOS dan dari provinsi untuk menopang kekurangan dana bagi penyelenggaraan pendidikan gratis.
3. *Sharing* pendapatan badan usaha milik daerah dan BUMN yang terletak di daerah.

- a. Dalam perusahaan yang cukup besar dapat mengalokasikan dana social rutin untuk memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pendidikan gratis didaerah.
- b. Bagi daerah yang terdapat investasi asing seperti perusahaan minyak asing dan penambangan dapat meminta ini dengan kebijakan dari pemerintah daerah serta tidak merugikan kedua pihak (*sumber : Pokja Pendidikan Gratis DIY*).

4. Partisipasi masyarakat

Masyarakat memiliki peranan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan gratis. Salah satunya dengan ikut serta memberikan sokongan dana. Peran pemerintah daerah dalam mengatur hal ini diperlukan. Kekurangan ketuntasan dana dapat diambil dari penarikan sumbangan social daerah terutama bagi usaha dan perorangan yang dapat berkontribusi dalam menopang dana pendidikan gratis. Bisa dalam bentuk sertifikat pendidikan dan dibentuk dewan pendidikan daerah.

Dengan berbagai alternatif pendanaan bagi pendidikan gratis di Gunungkidul tersebut sangatlah diharapkan Pemkab mampu merencanakan dan memulai menganggarkan secara bertahap apabila belum mampu secara keseluruhan untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk negeri maupun swasta.

Besarnya anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi swasta adalah seperti diatas. Besarnya anggaran untuk sekolah swasta lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran untuk sekolah negeri. Namun apabila dalam perencanaan anggaran belum memungkinkan untuk mengcover total pembiayaan untuk sekolah negeri dan swasta, maka secara bertahap hanya sekolah negeri dahulu. Cara lain adalah dengan tahap gratis jenjang pendidikan dasar dahulu SD-SMP, kemudian menyusul sekolah menengah untuk periode selanjutnya.

Setelah pembahasan *unit cost*, maka pembahasan selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana sekolah gratis berkorelasi positif dengan kualitas yang baik, bukan sebaliknya sekolah gratis= tidak berkualitas. Sekolah Gratis hendaknya juga tidak menjadi kebijakan yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, dan jangan menjadi sebuah kebijakan yang tidak populis, ketika masyarakat masih memiliki minat yang rendah terhadap pendidikan (sekolah), maka kebijakan ini nantinya menjadi suatu yang sia-sia. Maka penting sekali pembahasan mengenai kualitas dan kampanye sekolah gratis di masyarakat Gunungkidul. **Sekolah gratis untuk pendidikan dasar (SD-SMP) dengan standar pelayanan yang bermutu;**

“Kewajiban pemerintah tidak hanya sebatas penyediaan berbagai gedung lembaga pendidikan atau pengaturan kurikulum, tetapi meliputi pula seluruh aspek pengelolaan pendidikan dan lembaganya sehingga tercipta proses pendidikan yang mampu mencerdaskan, mencerahkan, dan mampu menghasilkan anak didik yang berkualitas baik dari segi intelektual maupun spritual serta yang terpenting adalah mampu diakses seluruh lapisan masyarakat secara adil.”

Berdasarkan perhitungan *unit-cost* per siswa dalam bab pembahasan, Kabupaten Gunungkidul dapat melaksanakan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) dengan dukungan dana dari APBD Kab. Gunungkidul, APBD Propinsi DIY dan alokasi dana dari APBN

3.2.2.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Ada beberapa variabel yang menjadi varabel pengaruh kualitas pendidikan di Gunungkidul, yakni : **Pengajar, peserta didik, sarana&prasarana.**

Jika kita melihat pada variabel :

a. Pengajar

maka aspek yang perlu diperhatikan adalah: (1) kualitas pengajar terkait *skill*/keahlian, pengalaman kerja serta tingkat pendidikan; (2) rasio guru-murid

b. Peserta didik

Maka yang perlu diperhatikan adalah (1) kuanititas peserta didik; (2) proses pembelajaran; (3) serta kualitas peserta didik

c. Sarana dan prasarana

Aspek yang perlu diperhatikan adalah (1) sebaran sekolah-wilayah; (2) rasio gedung-murid, rasio kelas-murid; (3) peralatan pendukung pembelajaran; (4) buku-buku pelajaran dll

3.2.2.3 Kampanye " Ayo Sekolah"

Kampanye "ayo sekolah" ini bisa dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, yakni (1) kelompok *beneficiaries*/kelompok yang menerima kemanfaatan, (2) kelompok kepentingan, yakni: organisasi masyarakat (dasawisma, posyandu, PKK dll), paguyuban, komunitas, organisasi kepemudaan, organisasi politik, (3) kelompok-kelompok organisasi pemerintah, (4) institusi formal yang sudah ada, seperti Komite Sekolah, Ormas Keagamaan melalui mimbar ceramah agama, dll.

3.2.2.4. Penyediaan beasiswa bagi guru, alokasi dana pendidikan;

Hal ini terkait SDM tenaga kependidikan, diperlukan "perombakan" cara pandang penyelenggaraan pendidikan yang "fisik oriented" karena kebutuhan dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan mensyaratkan SDM kependidikan yang tangguh dan mumpuni untuk memenuhi amanat konstitusi dalam dunia pendidikan. Penyediaan beasiswa dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi guru menjadi usulan yang cukup relevan untuk dijalankan.

3.2.2.5. Sinergisitas *stakeholders* terkait;

Terkait kelembagaan, perlu dilakukan sinergi antara segenap *stakeholder* yang mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan (tidak hanya antar Dinas Pendidikan Kabupaten) namun juga dengan DPRD Kabupaten, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas di lingkungan Pemkab Gunungkidul lain yang terkait, dan juga perlu mengoptimalkan fungsi Dewan Pendidikan dan memberdayakan Komite Sekolah. Sebagai bagian dari demokratisasi yang mensyaratkan adanya partisipasi dan transparansi, maka peran Komite Sekolah

perlu lebih dioptimalkan. Pelatihan dan sosialisasi peran dan fungsi Komite Sekolah perlu dilakukan.

3.2.2.6. Standarisasi pembiayaan untuk jenjang sekolah lanjutan;

Kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, sekolah di Wonosari dan non-Wonosari juga perlu dicarikan formulasi solusinya, termasuk mengatasi kesenjangan pungutan dana antar sekolah.

3.2.2.7. Memberikan keterampilan kepada siswa SMP melalui Program SMP Plus.

Kondisi dan latar belakang peserta didik di Gunungkidul yang khas perlu diimbangi dengan pemberian program ketrampilan tambahan yang bisa menjadi bekal mereka berkiprah di lingkungannya.

BAB IV

ANALISIS POTENSI ANGGARAN DAERAH

4.1 ANALISA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 2007 KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Kebijakan Umum Anggaran merupakan kesepakatan antara Bupati dan DPRD Gunungkidul dalam rangka penyusunan APBD. KUA dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2007. KUA merupakan hasil musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Gunungkidul sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. KUA adalah cerminan Kabupaten Gunungkidul setahun kedepan.

Prioritas pembangunan Gunungkidul 2007:

Menyelesaikan masalah-masalah :

1. Kemiskinan
2. Pengangguran
3. Ketertinggalan dengan daerah lain

1. Plafonisasi Dana

Tabel.38. Plafonisasi Dana

No	A. URUSAN	Plafon	% Total	Peringkat
1	Belanja operasional SKPD	12,429,197,000	7.49	4
2	Pendidikan	25,246,193,000	15.21	2
3	Kesehatan	19,500,300,000	11.75	3
4	Pekerjaan umum	57,687,500,000	34.76	1
5	Perumahan	0	0.00	33
6	Tata ruang	175,000,000	0.11	29
7	Perencanaan pembangunan	2,371,900,000	1.43	12
8	Perhubungan	947,250,000	0.57	18
9	Lingkungan hidup	468,000,000	0.28	22
10	Pertanahan	10,000,000	0.01	32
11	Kependudukan dan catatan sipil	1,219,500,000	0.73	15
12	Pemberdayaan perempuan	253,000,000	0.15	27
13	Keluarga berencana & Kel. Sejahtera	963,250,000	0.58	17
14	Sosial	4,435,895,000	2.67	8
15	Tenaga kerja	1,411,900,000	0.85	14
16	Koperasi dan UKM	778,500,000	0.47	20
17	Penanaman modal	158,000,000	0.10	30

18	Kebudayaan	360,000,000	0.22	25
19	Pemuda dan olahraga	400,000,000	0.24	24
20	Kesatuan bangsa & politik dalam negeri	3,092,500,000	1.86	9
21	Pemerintahan umum	6,875,680,000	4.14	7
22	Kepegawaian	2,736,000,000	1.65	10
23	Pemberdayaan masyarakat desa	6,960,000,000	4.19	6
24	Statistik	225,000,000	0.14	28
25	Kearsipan	80,000,000	0.05	31
26	Komunikasi dan informasi	707,500,000	0.43	21
27	Pertanian	9,748,662,000	5.87	5
28	Kehutanan	1,039,000,000	0.63	16
29	Energi dan sumber daya mineral	425,000,000	0.26	23
30	Pariwisata	872,000,000	0.53	19
31	Kelautan dan perikanan	1,491,500,000	0.90	13
32	Perdagangan	2,546,500,000	1.53	11
33	Perindustrian	325,000,000	0.20	26

2. Plafon dana tertinggi dan terendah

Tujuh urusan dengan plafon tertinggi

Tabel.39. Plafon Dana Tertinggi

No.	URUSAN	JUMLAH	%
1	Pekerjaan Umum	57,687,500,000	34.76
2	Pendidikan	25,246,193,000	15.21
3	Kesehatan	19,500,300,000	11.75
4	Belanja operasional SKPD	12,429,197,000	7.49
5	Pertanian	9,748,662,000	5.87
6	Pemberdayaan masyarakat desa	6,960,000,000	4.19
7	Pemerintahan umum	6,875,680,000	4.14

Tujuh urusan dengan plafon terendah

Tabel.40. Plafon Dana Terendah

No.	URUSAN	JUMLAH	%
1	Perumahan	0	0
2	Pertanahan	10,000,000	0.01
3	Kearsipan	80,000,000	0.05
4	Penanaman modal	158,000,000	0.10
5	Tata ruang	175,000,000	0.11
6	Statistik	225,000,000	0.14
7	Pemberdayaan perempuan	253,000,000	0.15

4.2. ANALISA TERHADAP KUA GUNUNG KIDUL 2007:

- Draft KUA Gunungkidul tahun anggaran 2007 kebijakan umum pembangunan kabupaten Gunungkidul diarahkan untuk menyelesaikan masalah mendesak seperti kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan dengan daerah lain
- Arah kebijakan umum anggaran (prioritas program) tidak sinkron dengan plafonisasi anggaran. Urusan Pekerjaan Umum menghabiskan plafon sekitar 34,76% sangat kontras dengan pemberdayaan masyarakat desa yang hanya 4,19%.
- Pemerintah berencana memanfaatkan potensi sumberdaya alam melalui kerjasama dengan investor. Ingat investor tidak selamanya memberikan keuntungan yang berlipat tetapi malah menyengsarakan masyarakat sekitar. Prasyarat masuknya investor dengan pemberdayaan masyarakat dan jaminan tidak merusak alam serta kearifan lokal harus ditegaskan dalam KUA.
- KUA tidak menjelaskan secara rinci apakah alokasi anggaran itu akan dibiayai oleh APBD, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. Pemerintah juga perlu mempertegas apakah program yang dibuat dalam TA 2007 apakah ada yang didanai oleh hutang luar negeri atau tidak.
- Dalam APBD Gunungkidul tahun anggaran 2005/2006 sumber Pendapatan Asli Daerah tertinggi jika diambil 5 (lima) besar berturut-turut adalah Retribusi kesehatan, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, pajak penerangan jalan umum, retribusi pasar dan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi kesehatan bahkan melebihi target dari 6,9 M menjadi 10,4 M, hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena orang sakit (miskin pula) menjadi mesin penghasil uang bagi pemda, padahal layanan untuk mereka masih sangat dipertanyakan. Pemerintah seharusnya lebih berani melakukan terobosan-terobosan untuk memperoleh PAD dari sektor diluar urusan masyarakat miskin, misal pariwisata pantai yang selama ini kurang terkelola dengan baik,

atau sektor perikanan dan kelautan karena gunungkidul memiliki potensi kelautan yang cukup menjanjikan, sehingga ketergantungan pada DAU dan DAK bukanlah alasan untuk memungut “upeti” dari rakyatnya.

Tabel.41. Lima “Juara” Penyumbang PAD Tertinggi

Juara	Jenis PAD	Dinas pengelola	Jumlah
1	Retribusi kesehatan	Dinas kesehatan	10, 41 M
2	Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah	Dinas Peternakan	4, 28 M
3	Pajak penerangan jalan	BPKKD	2, 50 M
4	Retribusi pasar	Disperindagkop	1, 31 M
5	Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga	Disparbud	0, 72 M

- Dalam rangka mendorong akuntabilitas program dan anggaran, adanya audit atas pelaksanaan proyek pembangunan adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Komitmen pemerintah bahwa akan ada audit yang dilakukan untuk proyek-proyek pembangunan merupakan langkah positif yang harus didukung semua pihak. Namun, ada beberapa kelemahan dalam mekanisme audit ini, yang terfokus pada audit finansial (keuangan). Beberapa aspek lain seperti ketiadaan audit kinerja program dan anggaran, hingga keterbatasan cakupan karena menggunakan mekanisme sampling harus dilengkapi dengan second opinion dari sumber yang lain. *Participatory auditing* harus dimulai sebagai suatu langkah melibatkan masyarakat. Selain itu second opinion dari auditor independen juga diperlukan.
1. Berikut ini adalah beberapa contoh perbandingan program atau kegiatan pemerintah yang terlalu besar dan program untuk masyarakat yang terlalu kecil.

Tabel.42.
Perbandingan Program Atau Kegiatan Pemerintah Dan Program Untuk Masyarakat

No	Program/kegiatan	Organisasi	Pagu
1	Rehabilitasi gedung dinas/ cabang dinas, pengadaan peralatan kantor	Dinas Pendidikan	4,1 M
2	Pengadaan 5 unit mobil dinas	Bag. Perkap	1 M
3	Pengadaan pakaian dinas	Bag. Perkap	1,4 M
4	Pembangunan terminal wonosari	Dinas PU	3 M
5	Pendamping kontruksi JICA	Dinas PU	5 M
6	Pendidikan kedinasan	Kantor diklat	1,3 M

No	Program/kegiatan	Organisasi	Pagu
1	Pencegahan cacingan anak SD	Dinkes	12 Jt
2	Kesehatan lansia	Dinkes	58 Jt
3	Pemasyarakatan teknologi tepat guna	Dinsobermas	30 Jt
4	Pendampingan kewirausahaan industri kecil dan rumah tangga	Dinsobermas	60 Jt
5	Pelatihan manajemen UED – SP	Dinsobermas	20 Jt
6	Bimbingan kerja memasuki dunia kerja	Dinakertrans	5 Jt
7	Pemberdayaan kelompok perempuan		Tidak jelas

4.3. ANALISIS BELANJA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2006

Tabel.43. Analisa belanja Apbd Kabupaten Gunungkidul 2006

NO	BIDANG	INSTANSI	NOMINAL (RP)	ALOKASI APBD (%)	ALOKASI BIDANG (%)	KET
1	Administrasi Umum Pemerintahan	-	138.046.119.806,38	26,602	-	-
		1.DPRD	4.200.705.765,00	0,809	3,043	001-002
		2.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	893.934.936,00	0,172	0,648	003-005
		3.Sekretariat Daerah	90.542.664.793,60	17,448	65,589	006-118
		4.Sekretariat DPRD	6.006.626.376,80	1,158	4,353	119-129
		5.Bappeda	4.351.692.791,00	0,839	3,154	130-157
		6.Bawasda	2.146.036.942,00	0,414	1,556	158-166
		7.Badan Keuangan Daerah	10.217.469.851,00	1,969	7,402	167-184
		8.Kantor Kesbanglinmas	1.709.825.662,00	0,329	1,237	185-206
		9.Kantor Satpol PP	2.103.937.134,00	0,405	1,522	207-216
		10.Kantor Infokom	1.345.605.280,00	0,259	0,974	217-227
		11.Kantor KPUD	727.048.033,20	0,140	0,526	228-233
		12.Kec.Wonosari	865.436.570,00	0,167	0,628	234-238
		13.Kec.Paliyan	690.530.646,00	0,133	0,508	239-243

		14.Kec.Panggang	744.019.790,00	0,143	0,538	244-250
		15.Kec.Tepus	657.268.506,00	0,127	0,477	251-255
		16.Kec.Rongkop	717.166.974,00	0,138	0,519	256-261
		17.Kec.Semanu	918.554.174,00	0,177	0,665	262-268
		18.Kec.Ponjong	840.082.802,00	0,162	0,609	269-274
		19.Kec.Karangmojo	965.918.814,40	0,186	0,699	275-280
		20.Kec.Playen	797.940.274,00	0,154	0,579	281-287
		21.Kec.Nglipar	1.033.694.397,20	0,199	0,748	288-292
		22.Kec.Ngawen	686.632.259,98	0,132	0,496	293-297
		23.Kec.Semin	814.585.650,00	0,157	0,590	298-303
		24.Kec.Patuk	764.816.202,00	0,147	0,553	304-309
		25.Kec.Saptosari	656.105.836,00	0,126	0,474	310-314
		26.Kec.Gedangsari	644.959.538,00	0,124	0,466	315-321
		27.Kec.Girisubo	724.535.703,20	0,140	0,526	322-326
		28.Kec.Tanjungsari	650.159.812,00	0,125	0,470	327-334
		29.Kec.Purwosari	628.164.293,00	0,121	0,455	335-340
2	Pertanian dan Peternakan	-	16.327.115.170,00	3,146	-	-
		1.Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Perikanan	12.260.357.840,00	2,363	75,092	341-369
		2.Dinas Peternakan	4.066.757.330,00	0,784	24,908	370-392
3	Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.039.889.812,00	0,971	-	393-420
4	Perindustrian dan Perdagangan	-	6.990.441.795,60	1,347	-	-
		1.Dinas Perekonomian	4.002.724.006,00	0,771	57,260	421-454
		2.Kantor Pengelolaan Pasar	2.987.717.789,60	0,576	42,740	455-463
5	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.155.405.008,00	0,801	-	464-484
6	Kesehatan	-	47.955.174.083,60	9,241	-	-
		1.Dinas Kesehatan	34.567.244.026,00	6,661	72,082	485-512
		2.RSUD	13.387.930057,60	2,580	27,918	513-526
7	Pendidikan dan Kebudayaan	-	217.530.408.569,12	41,920	-	-
		1.Dinas Pendidikan	155.799.316.391,00	30,024	71,621	527-549
		2.Kantor Pendidikan dan Pelatihan	1.549.463.916,40	0,299	0,712	550-559
		3.TK Negeri Wonosari	213.920.986,00	0,041	0,098	560-563
		4.SMP 1 Wonosari	1.263.887.997,80	0,244	0,581	564-567
		5.SMP 2 Wonosari	1.377.731.624,00	0,265	0,633	568-571
		6.SMP 3 Wonosari	869.324.347,00	0,168	0,400	572-575
		7.SMP 4 Wonosari	746.132.241,00	0,144	0,343	576-579
		8.SMP 1 Patuk	1.061.887.935,00	0,205	0,488	580-583
		9.SMP 2 Patuk	799.632.429,00	0,154	0,368	584-588
		10.SMP 3 Patuk	824.405.956,00	0,159	0,379	589-593
		11.SMP 4 Patuk	757.228.415,00	0,146	0,348	594-598
		12.SMP 1 Saptosari	729.814.419,00	0,141	0,335	599-602
		13.SMP 2 Saptosari	424.068.298,80	0,082	0,195	603-606
		14.SMP 1 Tepus	837.251.947,00	0,161	0,385	607-611
		15.SMP 2 Tepus	636.341.813,00	0,123	0,293	612-615
		16.SMP 3 Tepus	251.062.484,20	0,048	0,115	616-619
		17.SMP 1 Tanjungsari	650.937.326,00	0,125	0,300	620-623

		18.SMP 2 Tanjungsari	782.427.380,00	0,151	0,360	624-627
		19.SMP 1 Playen	1.317.665.637,00	0,254	0,606	628-632
		20.SMP 2 Playen	1.046.150.923,00	0,202	0,481	633-637
		21.SMP 3 Playen	939.048.220,00	0,181	0,432	638-641
		22.SMP 4 Playen	789.201.976,00	0,152	0,363	642-645
		23.SMP 1 Ngawen	783.124.850,00	0,151	0,360	646-649
		24.SMP 2 Ngawen	599.218.856,00	0,115	0,275	650-654
		25.SMP 3 Ngawen	643.297.865,00	0,124	0,296	655-658
		26.SMP 1 Gedangsari	656.631.627,00	0,127	0,302	659-662
		27.SMP 2 Gedangsari	914.641.048,00	0,176	0,420	663-666
		28.SMP 3 Gedangsari	576.747.179,00	0,111	0,265	667-670
		29.SMP 1 Ponjong	1.199.396.887,20	0,231	0,551	671-675
		30.SMP 2 Ponjong	617.409.128,00	0,119	0,284	676-679
		31.SMP 3 Ponjong	543.023.935,40	0,105	0,250	680-683
		32.SMP 4 Ponjong	321.723.772,20	0,062	0,418	684-688
		33.SMP 1 Paliyan	1.033.577.481,00	0,199	0,475	689-692
		34.SMP 2 Paliyan	622.629.194,00	0,120	0,286	693-697
		35.SMP 1 Karangmojo	1.157.627.476,00	0,223	0,532	698-701
		36.SMP 2 Karangmojo	1.194.561.696,00	0,230	0,549	702-705
		37.SMP 3 Karangmojo	683.796.474,00	0,132	0,314	706-710
		38.SMP 1 Panggang	1.321.923.258,00	0,255	0,608	711-715
		39.SMP 2 Panggang	686.054.687,00	0,132	0,315	716-719
		40.SMP 1 Purwosari	497.926.932,00	0,096	0,229	720-724
		41.SMP 1 Rongkop	732.851.318,80	0,141	0,337	725-728
		42.SMP 1 Girisubo	751.012.522,60	0,145	0,345	729-733
		43.SMP 2 Girisubo	499.690.670,20	0,096	0,230	734-738
		44.SMP 1 Semanu	1.067.572.026,00	0,206	0,491	739-742
		45.SMP 2 Semanu	745.215.262,00	0,144	0,343	743-746
		46.SMP 3 Semanu	596.525.141,00	0,115	0,274	747-751
		47.SMP 1 Semin	902.385.343,80	0,174	0,415	752-754
		48.SMP 2 Semin	711.123.924,00	0,137	0,327	755-759
		49.SMP 3 Semin	675.828.929,80	0,130	0,311	760-764
		50.SMP 1 Nglipar	919.797.708,00	0,177	0,423	765-769
		51.SMP 2 Nglipar	740.663.110,00	0,143	0,340	770-773
		52.SMP 3 Nglipar	222.543.298,00	0,043	0,102	774-778
		53.SMP 4 Ngawen	359.899.539,00	0,069	0,165	779-783
		54.SMP 3 Saptosari	65.785.000,00	0,013	0,030	784-786
		55.SMP 3 Panggang	69.290.000,00	0,013	0,032	787-789
		56.SMK 1 Wonosari	2.213.051.230,00	0,426	1,017	790-793
		57.SMK 2 Wonosari	3.988.352.335,00	0,769	1,833	794-797
		58.SMK 3 Wonosari	876.280.478,00	0,169	0,403	798-804
		59.SMA 1 Patuk	962.692.175,00	0,186	0,443	805-807
		60.SMA 1 Panggang	878.851.665,00	0,169	0,404	808-812
		61.SMA 1 Rongkop	715.215.594,00	0,138	0,329	813-818
		62.SMA 1 Wonosari	1.413.473.508,00	0,272	0,650	819-822
		63.SMA 2 Wonosari	1.664.025.171,20	0,321	0,765	823-826
		64.SMA 1 Playen	1.124.871.826,00	0,217	0,517	827-830
		65.SMA 2 Playen	1.050.031.446,40	0,202	0,483	831-834
		66.SMA 1 Semin	1.206.626.456,80	0,233	0,555	835-838
		67.SMA 1 Tanjungsari	706.515.840,40	0,136	0,325	839-842
		68.SMA 1 Semanu	714.226.283,00	0,138	0,328	843-846
		69.SMA 1 Karangmojo	1.274.614.204,40	0,246	0,586	847-850
		70.SMA 1 Nglipar	622.691.825,00	0,120	0,286	851-855
		71.SMK Tanjungsari	404.756.144,80	0,078	0,186	856-860
		72.SMK Gedangsari	219.204.076,60	0,042	0,101	861-865
		73.SMK Purwosari	301.366.872,72	0,058	0,139	866-870

		74.SMK Girisubo	141.308.394,20	0,027	0,065	871-875
		75.SMK Saptosari	271.855.041,40	0,052	0,125	876-880
8	Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13.609.738.910,00	2,623	-	881-905
9	Pekerjaan Umum	Dinas PU	54.311.777.244,60	10,466	-	906-939
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan	3.447.801.522,80	0,664	-	940-952
11	Lingkungan Hidup	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	1.716.545.215,20	0,331	-	953-968
12	Kependudukan	-	6.262.475.221,50	1,207	-	-
		1.Dinas Kependudukan KB	5.296.122.587,50	1,021	84,556	969-992
		2.Kantor Catatan Sipil	966.352.634,00	0,186	15,429	993-1002
13	Kepariwisata	Dinas Pariwisata&Budaya	3.543.650.956,00	0,683	-	1003-1021
			518.924.017.026,89			

sumber: Olahan Tim Maarif Institute terhadap APBD Gunungkidul 2006

1. Dana Untuk Urusan Pilihan

- 1) Pertanian → 56,38 % dari total belanja untuk Urusan Pilihan
 - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holti = 39,19 %
 - Dinas Peternakan = 13,74 %
 - Kantor Penyuluh Pertanian Daerah = 3,45 %
- 2) Kehutanan → Dinas Kehutanan = 19,53 %
- 3) Energi & Sumberdaya Mineral → Kantor Pertambangan & Energi = 1,004 %
- 4) Kelautan & Perikanan → Dinas Kelautan & Perikanan = 10,54 %
- 5) Perdagangan → Kantor Pengelolaan Pasar = 12,54 %

Total Pendapatan = 565.494.905.463,00 : - Urusan Wajib → 557.872.426.263,00
- Urusan Pilihan → 7.622.497.200,00

Total Belanja Langsung & Tidak untuk Urusan Wajib → 550.046.537.355,40
untuk Urusan Pilihan → 29.709.008.107,00

2. % Dana untuk Urusan Wajib :

- 1) Pendidikan → Belanja total → 262.619.345.129,31 → 47,74 %
% Total Belanja Pendidikan dari Urusan Wajib = 47,74 % dari total belanja urusan wajib
 - Dinas Pendidikan = 35,47 % dari total belanja urusan wajib
 - Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah = 0,105 %
 - TK Negeri Wonosari = 0,04 %
 - SMP = 7,84 %
 - SMK = 4,29 %
- 2) Kesehatan → Belanja total → 55.407.371.211,68 → 10,07 %

% Belanja total Kesehatan dari Urusan Wajib = 10,07 % dari total belanja urusan wajib

- Dinas Kesehatan & KB = 7,54 %
- RSUD = 2,53 %
- 3) Pekerjaan Umum → Dinas Pekerjaan Umum → 8,87 %
- 4) Perencanaan Pembangunan → BAPPEDA → 0,75 %
- 5) Perhubungan → Dinas Perhubungan → 1,19 %
- 6) Lingkungan Hidup → Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah → 0,37 %
- 7) Kependudukan & Catatan Sipil → Kantor Kependudukan & Catatan Sipil → 0,77 %
- 8) Social → Dinas Sosial & Pemberdayaan Masy → 2,31 %
- 9) Tenaga Kerja → Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi → 0,89 %
- 10) Koperasi & Usaha Kecil Menengah → Dinas Perindagkop → 0,76 %
- 11) Kebudayaan → Dinas Pariwisata & Kebudayaan → 0,65 %
- 12) Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri → 0,84 %
 - Kantor Kesbang & Perlindungan Masy = 0,41 %
 - Satuan Polisi Pamong Praja = 0,43 %
- 13) Pemerintahan Umum → 23,36 %
 - DPRD = 1,4 %
 - Kepala Daerah & Wakil Daerah = 0,086 %
 - Sekda = 3,94 %
 - Sekretariat DPRD = 1,6 %
 - Badan Pengelola Keuangan & Kekayaan Daerah = 12,45 %
 - Inspektorat Daerah = 0,52 %
 - Kecamatan = 3,12 %
- 14) Kepegawaian → Badan Kepegawaian Daerah = 1,14 %
- 15) Komunikasi & informasi → Kantor Informasi & Komunikasi = 0,3 %

3. Penulisan dalam RKPD (Menurut SKPD)

Tabel.44. Penulisan dalam RKPD (Menurut SKPD)

SETDA BAGIAN PEMDES	Hlm 182 : - Rapat Kerja Teknis Pemerintahan Desa → 1X - Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa → 4 X ket : Sasaran/ Indikator sama lebih baiknya dieliminasi salah satu or digabung
SETDA BAGIAN EKOBANG	Hlm 188 : - Fasilitas Peminaan Umat Beragama → 400 jt - Fasilitas Kegiatan bersama inter & antar umat beragama → 750 jt
SETDA BAGIAN PERLENGKAPAN	hlm 200 : - Pengadaan sarana perkantoran → 7 jenis → 600 jt ket : 7 jenis apa saja ? hlm 201 : - Pengadaan Mobil Dinas → 5 unit → 1 M
SEKRETARIAT DPRD	hlm 202 : - Peningkatan Komunikasi Politik → 1 X → 159,315 jt ket : Indikator sama dengan kunjungan kerja bagi 45 anggota DPRD Hlm 64 Hlm 203 : - kunjungan kerja bagi 45 anggota DPRD → 5X meni

BAPPEDA	Hlm 204 : - Mengundang para pakar → 12 X
DINAS PERTANIAN TAN. PANGAN & PERIKANAN	Kemampuan Anggota DPRD Hlm 207 : - Koordinasi & fasilitasi pengembangan agropolitan → 100 jt Hlm 220 : - Pelatihan Pembuatan pupuk organik Ket : sama kasusnya dengan analisis pendekatan fungsi hlm 99 Hlm 221 : pemberdayaan pos pelayanan penyuluh/ BPP → 120 jt Hlm 225 : fasilitas sarana & prasarana penyuluh pertanian → 5 unit → 560 jt Ket : apa jenis or macamnya? Hlm 227 : pengembangan desa mina sdh diajukan → Ponjong, Genjahan 25 jt (hlm 220) hlm 223 : penanganan daerah sumber serangan OPT → 50 JT → 1 paket bandingkan dengan hlm 240 → 80 X → 16 jt hlm 234 : - kursus terpadu pola agribisnis → 7 jt ket : personilnya berapa ? Hlm 235 : - bantuan ternak untuk keluarga miskin (kambing & ayam buras) → 200 jt ket : jumlah ternak → lokasi → jumlah keluarga miskin Hlm 236 : - pengembangan sentra hijauan pakan ternak → 15 jt ket : lokasi sentra hijauan pakan ternak ? hlm 239 : penyegaran tenaga penyuluh → 10 jt hlm 253 : - Diklat Penganekaragaman produk olahan → 60 jt ket : personil ? hlm 255 : - Program Peningkatan Kualitas tanah, air & udara kegiatan : penyusunan sistem pelaporan pemanfaatan air tanah → indicator → pembinaan & pemahanan pemanfaatan air tanah → 75 jt hlm 257 : - temu pengusaha industri → 10 jt ket : tak ada keterangan berapa kali? Hlm 259 : - penyediaan sarana show room → 500 jt Ket : apa saja ? bangunan ? sampai 500 jt? Hlm 262 : - Pembinaan Usaha Pariwisata → 10 jt Ket : lokasinya dimana? Pembinaan dilakukan untuk berapa personil? Hlm 265 : - pemeliharaan Gedung kantor tempat kerja → 350 jt Hlm 270 : - rehabilitasi Gedung SD/MI → 10,9 M → 100 unit Hlm 270 : - pengadaan buku, alat kantor untuk perpustakaan → dibandingkan 217,5 jt → 6 paket hlm 286 : - Bantuan operasional bagi kader Kelembagaan KB → 426,390 jt hlm 289 : - Pengadaan peralatanan praktek → 300 jt → spesifik alatnya? Hlm 304 : relokasi pasar hewan → 2M Hlm 326 : Diklat computer → 90 orang → 67,5 jt Ket : 1 orangnya 750 rb → berapa kali ?
DINAS PETERNAKAN	
DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN	
DINAS PEREKONOMIAN	
DINAS PARIWISATA	
DINAS PENDIDIKAN	
DINAS KEPENDUDUKAN & KB	
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	
DINAS PEKERJAAN UMUM	
KANTOR DIKLAT	
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LING. HIDUP	
KANTOR POL PP	

RSUD	<p>Hlm 322 : - Program Penataan Hukum & Peraturan Lingkungan Hidup Kegiatan peringatan hari besar & lomba ling.hidup Ket : program dengan kegiatan cocok gak?</p> <p>Hlm 329 : - Pengadaan pakaian dinas, perlengkapan & peralatan Pol PP & PPNS Ket : volumenya? → 150 jt</p> <p>Hlm 345 : - Pengadaan obat & perbekalan kesehatan Ket : volumenya??</p>
------	---

4. Penelusuran dalam RKPD (Menurut Pendekatan Fungsi)

- Hlm 52 : - pembinaan & monitoring kearsipan
- Bintek kearsipan
- Hlm 57 : - koordinasi pengembangan agropolitan → 100 jt → 7 kec
ket : koordinasinya seperti apa ?
Apa tiap kecamatan sudah ada komoditas unggulan?
- Hlm 59 : - Pengadaan sarana perkantoran → 7 jenis → 600 jt
Ket : Apa saja sarana itu?
Perbandingannya dengan hlm 60 ttg pengadaan sarana perkantoran
- Hlm 64 : - kunjungan kerja bagi 45 anggota DPRD
- Mengundang Pakar
- Hlm 74 : - fasilitasi Pembinaan Umat Beragama → 400 jt
- fasilitasi kegiatan bersama inter & antar umat beragama → 750 jt
ket : bentuk kegiatan apa?
- Hlm 85 : - penyegaran tenaga penyuluh
- Hlm 94 : - kursus terpadu pola agribisnis
Ket : personilnya berapa ? pertimbangan tepat sasaran
- Hlm 95 : - bantuan ternak kepada keluarga miskin (kambing & ayam buras) → 200 jt
Ket : jumlah ternaknya & keluarga yang berhak menerima berapa?
- Hlm 99 : - pelatihan pembuatan pupuk organik → 14 jt
Ket : pupuk organik jenis apa → kompos? Atau apa?
Bukankah sdh mjd program kegiatan penyuluh, padahal tidak membutuhkan
banyak biaya?
- Hlm 108 : - programnya peningkatan kualitas tanah, air & udara
Ket : kegiatannya penyusunan sistem pelaporan pemanfaatan air tanah ? 75 jt
- Hlm 111 : - fasilitasi sarana & prasarana penyuluhan pertanian → 560 jt
Ket : apa saja?
- Hlm 123 : - penyediaan sarana show room bagi produk daerah → 500 jt
Ket : sarannya apa saja? Apa sdh terbentuk konsep pengembangan agropolitan yang

- Matang, pemantauan produk atau komoditas unggulan sdh bereskah?
- Hlm 128 : - programnya penataan hokum & peraturan lingkungan hidup
Ket : kegiatannya peringatan hari besar & lomba lingkungan hidup → 50 jt
- Hlm 131 : - relokasi pasar hewan Siyono → 2 M
- Hlm 134 : - pembangunan & rehab Prokasih kali Kepek
Ket : anggarannya berapa?
- Hlm 146 : - pengadaan obat & perbekalan kesehatan → 3,5 M
Ket : Berapa paket/ banyaknya ? tdk ada keterangan
- Hlm 147 : - Pembinaan usaha pariwisata
Ket : sasarannya lebih ke mana → kecamatan atau seluruh kaupaten Gunung Kidul?
- Hlm 160 : - Pengadaan peralatan praktek → 300 jt
Ket : tdk ada spesifikasi alatnya
- Hlm 170 : - Program → Pengembangan Tenaga Kerja Terampil → 372,5 jt
Ket : personilnya tidak jelas jumlahnya

4.4. ANALISIS APBD GUNUNG KIDUL 2007

4.4.1 PENDAHULUAN

Dokumen APBD sebagai salah satu representasi adanya kehidupan demokrasi, tampaknya harus benar-benar diperhatikan ketersediaan dan kualitasnya. Karena dokumen APBD menjadi alat ukur kualitas demokrasi suatu pemerintahan. Dilihat dari ketersediannya, dokumen-dokumen anggaran di Yogyakarta sudah relatif mudah untuk didapatkan. Namun ada satu hal yang menjadi catatan khusus atas ketersediannya. Dokumen anggaran yang masih berupa rancangan ternyata tidak dengan mudah dapat diakses. Sekilas terlihat adanya 'larangan' dokumen rancangan disebar ke wilayah publik. Lalu, jika dokumen rancangan sulit untuk diakses, dari mana masyarakat akan mengontrol, memberikan *feedback* atas rancangan tersebut? Meskipun telah ada forum-forum public hearing yang dilakukan oleh pemerintah; tetapi, dokumen yang ada bersifat gelondongan dan pemerintah tidak cukup komunikatif menanggapi *feedback* dari masyarakat.

APBD Gunung Kidul 2007 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No 26 tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007.

APBD Gunungkidul 2007 ditetapkan tanggal 30 April 2007. Asumsinya selama 4 bulan program-program yang dirancang belum bisa dieksekusi, kecuali anggaran yang rutin harus dikeluarkan seperti gaji aparatur.

Tahun anggaran 2006, Gunungkidul menyusun anggarannya secara defisit sebesar Rp. 7.301.156.713,00 lebih besar dari tahun 2006 (1,3 Miliar). Yang perlu dilihat adalah, apa dasar pemikirannya anggaran disusun secara defisit? Jika tujuannya sebagai alat stimulus untuk menaikkan PAD, hendaknya kenaikan PAD tidak dibebankan pada sector-sektor layanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan air bersih. Dan semoga tidak dalam upaya untuk mendapatkan dana lebih besar dari pemerintah pusat.

4.4.2. ANALISIS PENDAPATAN

Komponen pendapatan terdiri dari 5 bagian yaitu bagian sisa tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan menjadi tolok ukur seberapa besar daerah itu akan dapat mengalokasikan belanjanya.

Tabel 45. Perbandingan pendapatan APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

No.	PENDAPATAN	Gunungkidul 2006	Gunungkidul 2007
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25,485,903,150	27,473,888,570
2	DANA PERIMBANGAN	490,535,621,940	529,089,447,170
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1,600,000,000	16,989,098,300
	TOTAL PENDAPATAN	517,621,525,090	573.552.434.040

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH: Retribusi Kesehatan Masih Menjadi Primadona

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi SDA dan masyarakat di wilayah masing-masing. Meskipun rata-rata PAD hanya memberikan masukan sebesar 4,7 % dari total pendapatan daerah, namun Gunungkidul tetap saja menjadikan pelayanan masyarakat sebagai sumber potensial PAD. Padahal PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (pasal 3 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004). Namun apa jadinya kalau pasal ini diartikan sebagai kesempatan dalam menggali sebanyak-banyaknya uang masyarakat agar dapat melaksanakan otonomi. Tidak ada batasan apakah yang digali adalah pelayanan dasar warga atau bukan.

Daftar juara PAD dibawah ini akan memperlihatkan betapa orang sakit masih menjadi primadona untuk mendongkrak pendapatan daerah, bahkan targetnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 46. Daftar Sumber-sumber Terbesar PAD

No.	Sumber PAD	Tahun 2006	Tahun 2007
1	Ret. Pelayanan kesehatan puskesmas dan RSUD	6,873,750,000.00	8,107,970,000.00
2	Ret. Jasa usaha potong hewan	4,280,562,500.00	4,182,330,000.00
3	Pajak Penerangan Jalan Umum	2,745,707,800.00	,500,000,000.00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

2. PERIMBANGAN DAERAH: Bukti Masih Saentralistiknya Distribusi Anggaran

Dana perimbangan menjadi sangat berarti bagi daerah karena prosentasenya yang cukup besar dibanding pendapatan lainnya. Prosentase dana perimbangan telah ditentukan dengan jelas dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Tujuan adanya dana perimbangan menurut UU No. 34/2004 adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah, pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Dibalik semuanya, disparitas yang cukup besar antara dana perimbangan dengan PAD memunculkan kekhawatiran adanya resentralisasi dan keinginan pusat untuk menguasai lebih banyak hasil potensi daerah.

Tabel 47. Dana Perimbangan

No.	Dana perimbangan	Jumlah
1	Dana bagi hasil	20,071,447,170.00
2	Dana Alokasi Umum	459,851,000,000.00
3	Dana alokasi khusus	49,167,000,000.00
	T o t a l	529,089,447,170.00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2007

4.4.3. ANALISIS BELANJA

1. Anggaran untuk Memenuhi Hak Dasar Warga

Kebijakan anggaran adalah instrument penting yang dimiliki oleh Negara untuk menjalankan kewajiban Negara (*state obligation*). Kebijakan anggaran adalah ranah strategis untuk mengukur seberapa jauh pemenuhan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi warga Negara tercapai.

Ada 2 aspek pemenuhan hak asasi yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah yaitu *progressive realization* dan *full use of maximum available resource*.

Progressive realization berarti kewajiban pemerintah untuk secara terus menerus meningkatkan pemenuhan hak dasar rakyat. Perwujudannya dalam kebijakan anggaran berupa kewajiban pemerintah untuk terus menerus meningkatkan jumlah anggaran yang dilaokasikan untuk kesejahteraan social. Kenaikan ini merupakan kenaikan riil bukan berdasarkan kenaikan untuk menyesuaikan inflasi.

Sedangkan *full use of maximum available resource* memiliki makna kewajiban bagi pemerintah untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya untuk pemenuhan hak asasi rakyat. Realisasinya dalam kebijakan anggaran adalah kewajiban bagi pemerintah untuk semaksimal mungkin menggunakan sumber pendapatan anggaran pemerintah bagi pembelanjaan terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia seperti pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan lain-lain.

Apabila melihat konvensi Wina 1993, dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah harus mengambil sikap. Apakah ia sekedar menghormati, melindungi, memfasilitasi, ataukah memenuhi hak-hak warga.

Pendekatan yang diambil juga harus menegaskan bahwa program yang dibuat bukan sekedar berdasarkan kebutuhan tetapi merupakan layanan public yang harus dilakukan sebagai hak warga Negara yang tak dapat ditunda pelaksanaannya. Layanan ini perlu memperhatikan *kesetaraan* (tanpa membedakan mereka yang berada di istana atau daerah terpencil bahkan daerah yang secara akses atas layanan hak dasar minim harus mendapat prioritas),

ketidak terpisahan (tidak ada prioritas dalam memenuhi hak dasar warga, namun masih sulit dilaksanakana karena keterbatasan anggaran), *standar kinerja* (pelaksanaan layanan harus dapat diukur), *partisipasi* (keterlibatan warga dalam setiap proses), *pemberdayaan* (program yang dibuat bukan dalam kerangka melemahkan posisi warga yang lemah) dan *akuntabilitas* (menggunakan fasilitas hukum untuk menuntut hak warga dan mendorong pelaksana kebijakan untuk membuat program yang akuntabel).

Berdasarkan pendekatan hak dasar dengan beragam aspek dan unsur dasar yang harus dipenuhi, ulasan dibawah ini akan melihat apakah pemerintah daerah Gunungkidul telah membuat program pembangunan untuk memenuhi hak-hak warganya.

A. Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari masyarakat yang harus dipenuhi. Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar di bidang pendidikan, dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Tabel berikut memperlihatkan berapa alokasi anggaran pendidikan dari masing-masing daerah di Kabupaten/Kota DIY.

Rasabel.48. Ratio belanja pendidikan terhadap total belanja APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2006-2007

	2006	2007
anggaran pendidikan	155,799,316,391.00	261,980,945,129.00
rasio terhadap APBD	30,02%	45.10 %
belanja non kedinasan	22,841,672,500.00	
rasio belanja non kedinasan terhadap APBD	4,40%	

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

Terdapat kenaikan sebesar Rp 106,181,628,738.00. Kenaikan yang relative besar secara kuantitatif. Dari sisi prosentase belanja terdapat kenaikan lebih dari 15 %.

Jika mengacu pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, dimana merekomendasikan 20% dari APBD untuk belanja pendidikan non kedinasan.

Untuk format APBD sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 harus dilihat kembali mana anggaran yang diperuntukkan bagi dinas dan mana yang dipergunakan untuk belanja non kedinasan. Kategori belanja langsung dan tidak langsung hanya diperuntukkan bagi belanja dinas dan belanja program. Dalam belanja program masih banyak yang dibayarkan kepada aparatur (pegawai honorer maupun PNS).

Pada tahun 2007, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan beberapa program pendidikan masyarakat yang lebih beragam dari tahun sebelumnya. Tabel dibawah ini menunjukkan ragam anggaran yang diprogramkan.

Tabel 49. Bantuan Pendidikan Untuk Masyarakat

No	Bantuan kepada badan/lembaga/ormas/swasta	Frekuensi	Lokasi	Jumlah
1	Kelompok usaha pemuda produktif/KUPP	18	kec.	45,000,000.00
2	Kelompok seni pemuda	18	kec.	27,000,000.00
3	Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	51	PKBM	153,000,000.00
4	TK swasta	100	TK	1,500,000,000.00
5	alat permainan edukatif untuk TK	100	TK	150,000,000.00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2007

Bahasa “bantuan” dalam APBD perlu dilihat kembali untuk menunjukkan bahwa APBD adalah hak masyarakat. Fungsi pemerintah adalah sebagai pengelola. Apalagi dalam hal pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggungjawab pemerintah.

Tabel 50. Bantuan PAUD tahun 2006-2007

No	Program	Tahun 2006	Tahun 2007
1	pengembangan lembaga PAUD	54,000,000.00	180,000,000.00
2	forum komunikasi PAUD	2,400,000.00	10,000,000.00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

Tabel 51. Perbandingan beasiswa tahun 2006 dan 2007

No	Program	2006	2007
1	beasiswa SMA/SMK/MA	117,000,000.00	312,000,000.00
2	retrivel SMA/SMK/MA	175,000,000.00	200,000,000.00
3	beasiswa transisi SMP/MTS	-	600,000,000.00
4	beasiswa prestasi SMP/MTs	315,000,000.00	315,000,000.00
5	beasiswa bakat prestasi SD/MI	450,000,000.00	450,000,000.00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

Untuk pendidikan usia dini dan beasiswa SD, SMP, SMU terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

B. Anggaran Kesehatan

Indikator anggaran kesehatan yang disarankan WHO adalah 5 % dari PDRB daerah. Kecenderungan yang ada di Gunungkidul, terdapat kenaikan belanja kesehatan dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun prosentase atas APBD dan PDRB.

Kenaikan anggaran kesehatan pada tahun 2007 juga diikuti dengan meniadakan pungutan retribusi puskesmas kepada warga yang memeriksakan kesehatan di puskesmas.

Tabel 52. Perbandingan belanja dinas kesehatan 2005-2006-2007

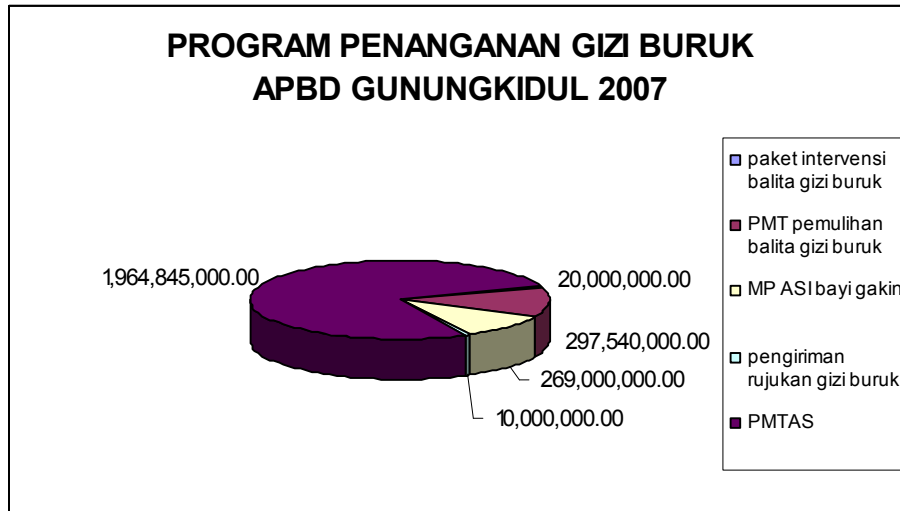
Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Total anggaran kesehatan	17,167,173,126	34,567,244,026	55,383,121,211.00
rasio angg. Kesehatan terhadap total APBD	4,7%	4,7%	9.53%
Prosentasi anggaran kesehatan atas PDRB GK 2005*	0.45%	0.90%	1.44%

*PDRB GK 2005 Rp 385.3621.000.000

Beberapa program kesehatan untuk masyarakat juga mengalami peningkatan. Sayangnya proram **posyandu** sebagai layanan terpadu yang paling dekat dengan masyarakat tidak terlihat jelas dalam program di tahun 2007. Padahal Posyandu menurut statemen Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dalam beberapa kesempatan di tahun 2007, akan difungsikan sebagai “Universitas Ndeso”, di mana sejumlah program-kegiatan Pemkab yang diperuntukkan bagi warga akan melalui Posyandu.

Layanan penanganan gizi burukpun beragam. Mulai dari pengiriman rujukan Rp 10 juta, intervensi gizi buruk Rp 20 juta, Makanan pendamping ASI bayi gakin Rp 269 juta, Pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan balita gizi buruk Rp 297.540.000, sampai pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) lebih dari 1 M.

Gabar 5. Porsi Anggaran Penanganan Gizi Buruk



Selain program penanganan gizi buruk terdapat beberapa program dan belanja modal untuk peningkatan derajat kesehatan warga. Terdapat pula upah untuk kader pendata kesehatan dan KB sampai di tingkat RT. Melihat adanya beberapa belanja modal dalam table dibawah, masyarakat perlu melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program ini. Contoh: dalam penanggulangan demam berdarah, abate sering diperjualbelikan oleh oknum. Padahal APBD sudah menyediakan

Tabel 53. Program peningkatan kesehatan warga

No.	PROGRAM	Jumlah	Satuan	Anggaran
1	pemeriksaan Hb @ Rp 3.700	1086	sample	4,018,200.00
2	pemeriksaan kadar yodium @ Rp 50.000	300	sample	15,000,000.00
3	belanja sanitasi dasar @ Rp 2.500.000	5	paket	12,500,000.00
4	pengadaan abate Rp 140 rb/kg	279	kg	39,060,000.00
5	upah kader pendata kes dan KB @ Rp 10.000	144	desa	1,440,000.00
		1434	dusun	14,340,000.00
		7075	RT	70,750,000.00

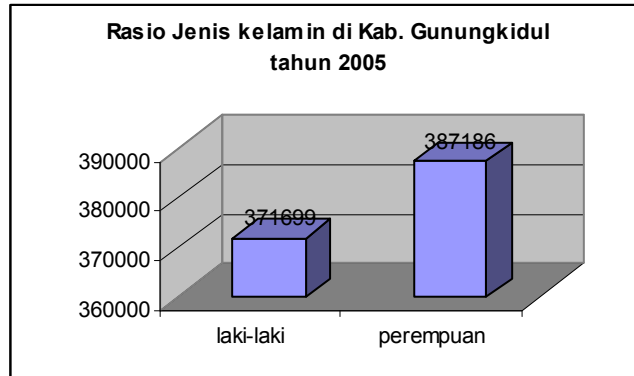
sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2007

C. WOMEN BUDGET (anggaran untuk kelompok perempuan)

Anggaran untuk kelompok perempuan diulas dalam bahasan tersendiri karena kelompok perempuan seringkali menjadi kelompok kelas 2 dalam struktur social ekonomi masyarakat. Padahal kelompok ini kebanyakan bekerja dengan berbagai urusan di beberapa wilayah. Mulai urusan terkait dengan

reproduksi (melahirkan, menyusui dll.) juga wilayah produksi dan social. Sayangnya seringkali wilayah produksi banyak didominasi oleh pekerjaan domestic yang tidak terukur dengan uang.

Gambar 6. Rasio Jenis Kelamin di Gunungkidul



Terkait dengan anggaran untuk kelompok perempuan, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 tahun 2003, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, BAB 111 pasal 9 ayat 1 telah menegaskan bahwa:

“Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5 % (lima persen) dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota.”

Anggaran yang penerima manfaatnya kelompok perempuan telah tersebar dalam beberapa program. Bagian ini akan memberikan gambaran anggaran yang spesifik untuk kelompok perempuan (termasuk anak-anak).

Tabel 54. Program spesifik untuk kelompok perempuan dan anak

No.	PROGRAM	2006	2007
1	pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak	5.000.000,00	10.000.000,00
2	pendampingan korban KDRT	5.000.000,00	10.000.000,00
3	PKK	70.500.000,00	115.640.000,00

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2006 dan 2007

Diagram ini menunjukkan ada 2 program layanan yang dapat diakses oleh kelompok perempuan (termasuk anak-anak) yaitu pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT. Terjadi peningkatan significant secara kuantitatif. Anggaran Rp 10.000,00 ini akan digunakan untuk pendampingan 20 korban.

Sedangkan anggaran untuk PKK baru dapat diakses oleh PKK kecamatan dan Kabupaten masing-masing sebesar Rp 54.000.000,00 untuk PKK di 18 kecamatan, masing-masing sebesar 3 juta. Sedangkan untuk PKK Kabupaten dapat mengakses lebih banyak anggaran yaitu sebesar Rp 61.640.000,00. Anggaran ini juga mengalami kenaikan dibanding dengan anggaran tahun 2006.

Namun demikian, seringkali anggaran untuk perempuan hanya disediakan untuk organisasi formal seperti PKK, Dharma Wanita dan tidak mensupport organisasi lokal yang *genuine* tumbuh dalam masyarakat misalnya kelompok perempuan petani, perempuan nelayan, usaha kecil, dll.

Hal yang menarik dari perspektif *Gender Mainstreaming Policy*, tahun 2007 ini Gunungkidul memiliki program Desa Sadar Gender. Dalam program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, pelatihan terhadap kelompok sadar gender di beberapa desa akan dilakukan. Dari program ini yang penting untuk dilihat adalah dampak pasca pelatihan. Perlu perumusan indicator yang jelas dan disepakati oleh warga untuk menentukan dampak dari program pelatihan kelompok sadar gender.

D. Anggaran Untuk Pengentasan Kemiskinan

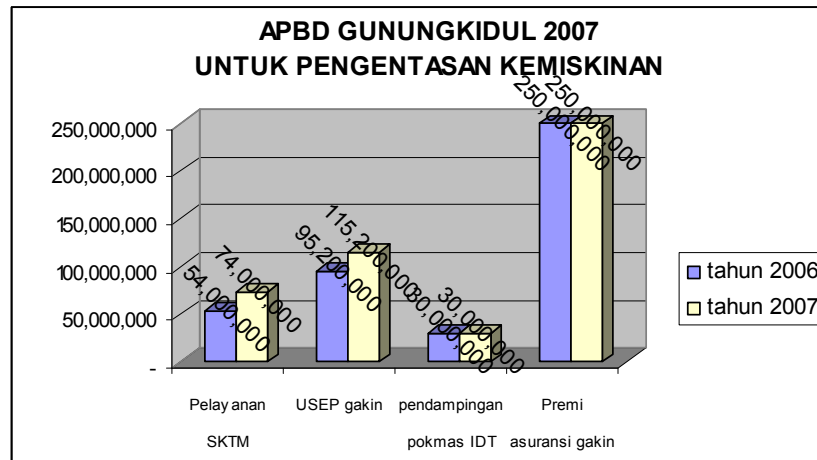
Index kemiskinan Gunungkidul menurut data Human Development Index UNDP-Bappenas-BPS, tahun 2004 menempati urutan ketiga setelah kota Yogya dan Sleman. Namun Index Pembangunan manusia menempati urutan terahir diantara kabupaten dan kota lain di Yogyakarta. Bahkan menempati peringkat ke-140 diantara kab dan kota seluruh Indonesia.

Melihat data statistik tersebut, sudah saatnya anggaran ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Karena hanya dengan program pengentasan

kemiskinan tanpa adanya peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya, tidak akan artinya bagi pengentasan kemiskinan di Gunungkidul.

Diagram dibawah ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 beberapa program pengentasan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dari diagram itu terbaca pelayanan SKTM dan Usaha ekonomi produktif untuk keluarga miskin mengalami peningkatan, tetapi pendampingan kelompok masyarakat IDT dan premi asuransi gakin tidak mengalami peningkatan.

Gambar 7. Skema Anggaran Pengentasan Kemiskinan Gunungkidul 2007



E. Pertanian dan Peternakan

Peran utama penyangga perekonomian gunungkidul adalah pertanian lahan tandus dan peternakan. Sektor ini mencapai 35,9% dari PDRB Gunungkidul dan menyerap 38 % tenaga kerja.

Namun demikian, urusan pertanian dan peternakan menjadi urusan pilihan didaerah ini. Prosentase belanja sector ini dibanding belanja APBD secara keseluruhan hanya 2%. Angka yang jauh dari cukup untuk sector yang diandalkan warga menjadi sumber penghasilan utama.

Tabel 55. Belanja Dinas Pertanian 2007

No.	BELANJA	JUMLAH	%
1	Belanja dinas pertanian	1.619.920.110,00	
2	belanja langsung (untuk pelaksanaan program)	7.276.441.500,00	63%
3	belanja tidak langsung (untuk gaji dinas)	4.343.478.610,00	37%

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2007

Dibawah ini beberapa program yang ditujukan untuk masyarakat. Mulai dari program pelatihan, kelembagaan petani, pembangunan lumbung pangan sampai penyediaan saprodi dan bibit unggul pertanian dan perkebunan.

Tabel 56. Beberapa Program di Dinas Pertanian

PROGRAM	RINCIAN	JUMLAH
Pelatihan petani dan agribisnis (pert.organik dan beras merah)		31.393.000,00
peningkatan kemampuan kelembagaan petani		33.290.000,00
pembangunan gedung lumbung pangan desa (gedangsari, saptosari, panggang, paliyan)		124.800.000,00
pembangunan green house (50 m2)		35.000.000,00
penyediaan saprodi pertanian / perkebunan	pengadaan bibit	682.397.500,00
	kakao	357.500.000,00
	petai	35.035.000,00
	kelapa	127.050.000,00
	cengkih	37.812.500,00
	Pembuatan kebun bibit desa	125.000.000,00
pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan		
	mangga malam	18.750.000,00
	srikoyo srinyonya	3.000.000,00
	benih aneka sayuran	4.500.000,00

sumber: KUA-PPA APBD Gunungkidul 2007

Sedangkan untuk sektor peternakan, dukungan pemerintah dan swasta relative besar untuk ternak sapi dan kambing. Data berikut menunjukkan jumlah bantuan pemerintah di sector ini.

Tabel 57. Jumlah Bantuan Pemerintah untuk Sector Peternakan

ternak kambing dan sapi bantuan pemerintah

Ternak	Bantuan	jumlah
sapi	Presiden	220
	Paceklik	2
	Pelita	3
	lpeda/pemda	2
	PTIDK	1134
Kambing	Presiden	1864
	Paceklik	2
	Pelita	59
	lpeda/pemda	58
	PTIDK	1817

Sumber: BPS GK 2005

Tabel 58. Beberapa Program di Sektor Peternakan Yang Ada Dalam APBD

No	Program	uraian		Jumlah
1	Pembibitan dan perawatan ternak	sapi betina	140	840.000.000,00
2	pembangunan poskeswan	lab kesehatan hewan		156000000
		poskeswan panggang		176800000
		rehab poskeswan bandung		149600000

Terkait dengan program pengentasan kemiskinan, berikut beberapa program ternak untuk KK miskin yang ada dalam APBD 2007

Gambar 8. Anggaran Ternak KK Miskin



Untuk mendukung program diatas, sub dinas peternakan mempunyai program pendistribusian ternak Rp 22.615.000,00 dan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan ke masyarakat sebesar Rp 7.035.000,00. Rencananya pada tahun ini kan didistribusikan ke Wonosari (pulutan), paliyan (karangduwet), Panggang (Giriharjo), Tepus (Sidoharjo), Rongkop (Semugih), Semanu (Semanu), Ponjong (Ponjong), Karangmojo (Karangmojo)

F. Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bagian C menyebutkan bahwa sumber pendapatan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

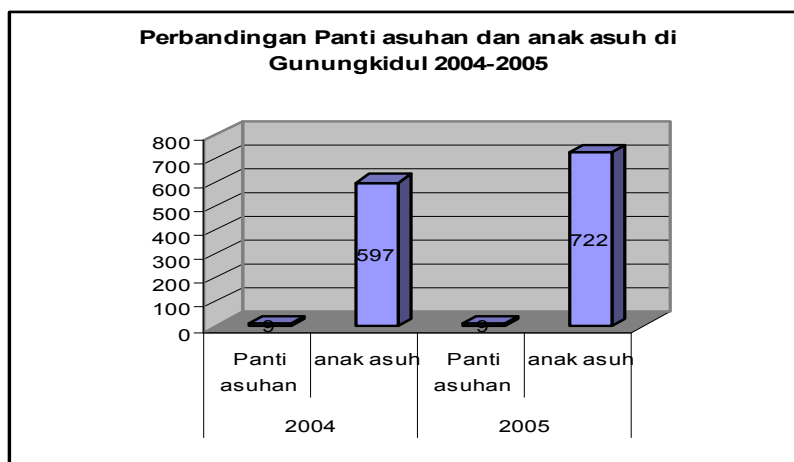
Apabila kita telusuri lebih lanjut dalam APBD Gunungkidul maka terjadi kenaikan Alokasi Dana Desa dari tahun 2006 sebesar Rp 10 Miliar menjadi Rp 16 Miliar pada tahun 2007. Peruntukan Alokasi Dana Desa bisa dilihat dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

G. Kelompok rentan (difabel dan yatim piatu)

Sebagai bagian dari warga masyarakat, kelompok difable adalah kelompok yang sering dilupakan dalam proses penganggaran daerah. Meskipun jumlah difable relatif tidak banyak dibandingkan dengan warga non difable, namun keberadaan mereka tidak bisa diabaikan. Jumlah warga difable di Propinsi DIY mencapai 3.102.530 jiwa (1,27%). Data terakhir menunjukkan warga difable di Propinsi DIY mencapai 5%, Di Gunungkidul terdapat 1564 anak cacat dan 4778 penyandang cacat (BPS Gunungkidul 2005). Jumlah tersebut nampaknya belum berimplikasi positif dalam kebijakan anggaran.

Selain difabel, kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah yatim/piatu/yatim-piatu. Dari Data BPS 2005, jumlah anak asuh cenderung mengalami kenaikan. Padahal jumlah panti asuhan yang menampung terbatas.

Gambar 9. Perbandingan Panti Asuhan dan anak asuh di Gunungkidul Th. 2004-2005



Sumber:???????

Oleh karena itulah, anggaran perlu merespon kondisi tersebut. APBD 2007 Gunungkidul, nampaknya telah memberikan respon positif dengan mengalokasikan Rp 120.000.000 untuk panti asuhan dan SLB serta Rp 43.500.000 untuk penderita cacat dan trauma.

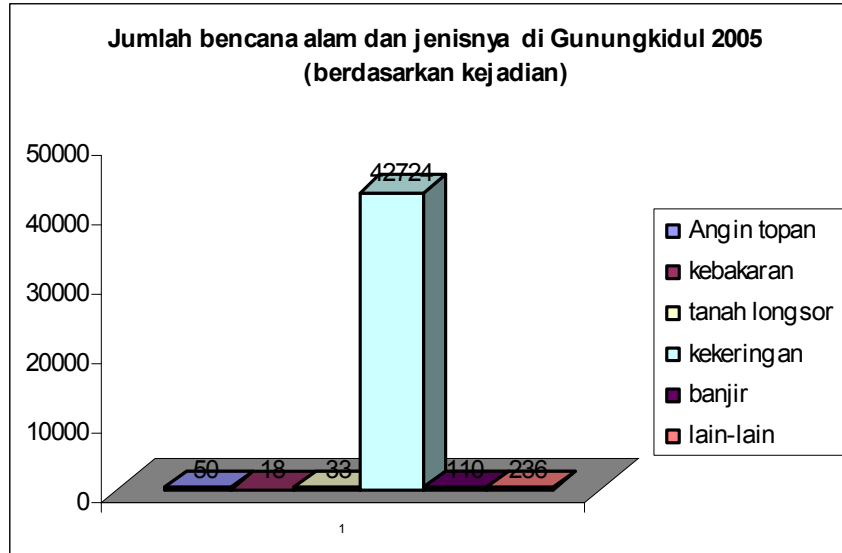
Anggaran untuk SLB ini meningkat dari tahun sebelumnya (2006) yang hanya sebesar Rp. 23.500.000.

H. Dana Kebencanaan

Bencana alam adalah suatu kejadian luar biasa yang perlu perhatian khusus. Kejadian ini tidak diinginkan, namun apabila sudah datang, tidak ada yang dapat menolak. Ada beberapa yang datangnya tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi tetapi ada bencana alam yang setiap tahun melanda suatu wilayah misalnya kekeringan. Melihat kenyataan yang terkadang unpredictable maka kesiapan untuk meminimalisir resiko (Disaster Risk Reduction) amat penting dilakukan. Salah satunya adalah dalam mempersiapkan anggaran untuk meminimalisir resiko tersebut.

Gunungkidul adalah salah satu daerah yang rawan bencana. Data dibawah ini menunjukkan beberapa bencana yang melanda Gunungkidul pada tahun 2005 berdasarkan kejadian. Dari data ini kekeringan menempati posisi teratas lalu diikuti oleh bencana lainnya, kemudian banjir, angin topan, tanah longsor dan kebakaran.

Gambar 10. Jumlah dan Jenis bencana alam di Gunungkidul Th 2005



Beberapa program antisipatif untuk mengatasi kekeringan ada dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum seperti pembangunan sumur pompa air. Selain itu dinas pertanian juga mempersiapkan lumbung padi untuk mengatasi rawan pangan akibat kekeringan.

Selain program antisipatif terdapat beberapa program yang sifatnya kuratif seperti santunan, bantuan penyelamatan dan lainnya. Namun, kesiapan untuk program kuratif ini lebih banyak ditujukan untuk bencana laut. Bencana lain nampaknya belum ada persiapan yang berarti.

Beberapa program kebencanaan dalam APBD Gunungkidul 2007

No	PROGRAM	ANGGARAN	DINAS
1	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	67.410.000	kelautan dan perikanan
2	santunan korban bencana alam	80.000.000	kebanglinmas
3	bantuan penyelamatan dan evakuasi korban	12.000.000	kebanglinmas
4	bantuan penguburan mayat korban laka laut	3.000.000	
5	bantuan uang duka korban laka laut u. wisatawan	10.000.000	
6	bantuan pengiriman korban laka-laut	5.000.000	

sumber: Olahan dari APBD Gunungkidul 2007

I. PENUTUP

Dokumen APBD Gunungkidul 2007 (penjabaran) perlu diapresiasi karena mudah dibaca. Penjelasan yang detail dari setiap program memudahkan warga untuk mengetahui untuk apa dan dimana program akan dilakukan.

Keragaman programnya juga lebih banyak dibanding tahun 2006. Sayangnya, beberapa anggaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat tidak mengalami kenaikan progressive dibanding tahun sebelumnya. Misalnya premi gakin tahun 2006 dan 2007 tidak mengalami perubahan anggaran.

Temuan yang menarik dari pembacaan APBD Gunungkidul 2007 adalah adanya pengadaan kamera yang berbeda-beda harganya ditiap-tiap dinas. Ada yang seharga 3 juta, 2 juta ada pula yang sampai 5 juta. Ada juga tunjangan untuk 1728 lurah Rp. 604.800.000 dan 1728 sekretaris desa sebesar Rp 518.400.000. Kalau asumsinya lurah dan carik adalah PNS maka mengikuti aspek *full use of maximum available resources*, tunjangan ini tidak perlu ada dan dapat dialokasikan untuk kesejahteraan warga.

Selain itu ada program yang pada tahun 2006 ada seperti pemberdayaan posyandu tidak muncul pada tahun 2007.

BAB V
KESIMPULAN STUDI DAN REKOMENDASI AKSI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Agenda mendesak untuk dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul:

4.1 Bidang Kesehatan

- a. Menambah jumlah unit layanan kesehatan, khususnya untuk layanan rawat-inap berbasis Puskesmas.
- b. Memperbaiki sistem layanan kesehatan untuk pasien dari keluarga miskin pemegang kartu JAMKESOS, ASKESKIN dan SKTM melalui sosialisasi SPM (Standar Pelayanan Minimum) dan Citizen's Charter dalam Pelayanan Publik.
- c. Menambah jumlah alokasi dana anggaran untuk pemberdayaan dan pengembangan aktivitas POSYANDU.

4.2 Bidang Pendidikan

- a. Merealisasikan pelaksanaan pendidikan murah/gratis untuk jenjang pendidikan wajar (wajib belajar) 9 tahun (SD-SMP).
- b. Menambah jumlah sekolah menengah pertama (SMP) satu-atap, khususnya di daerah pinggiran.
- c. Menambah alokasi dana untuk beasiswa retrieval dalam upaya mengurangi angka putus sekolah alasan biaya.

4.3 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengalokasikan dana stimulus untuk koperasi perempuan guna pengembangan kegiatan ekonomi keluarga.
- b. Menambah jumlah alokasi anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Menambah jumlah instalasi SIPAS berbasis komunitas untuk mengurangi dampak kekeringan/kesulitan pengadaan air.

Daftar Singkatan

APM	:	Angka Partisipasi Minimum
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DPRD	:	Dewan Pimpinan Rakyat Daerah
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
ESDM	:	Ekonomi Sumber Daya Manusia
HDI	:	<i>Human Development Index</i>
HDR	:	<i>Human Development Report</i>
SNPK	:	Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
SPKD	:	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
KK	:	Kepala Keluarga
KPDT	:	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
SK Menteri	:	Surat Keputusan Menteri
SDM	:	Sumber Daya Manusia
PDRB	:	Pendapatan Domestik Rasional Bruto
SD/MI	:	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
SMP/MTs	:	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
SPP	:	Sumbangan Pokok Pendidikan
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
PPA	:	<i>Participatory Poverty Assesment</i>
KUD	:	Koperasi Unit Desa
PPL	:	Petugas Penyuluhan Lapangan
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
RAPBS	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PADU	:	Pendidikan Anak Dini Usia
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
SKTM	:	Surat Keterangan Tidak Mampu
RT	:	Rumah Tangga
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
BPD	:	Badan Pemerintah Daerah
GK	:	GunungKidul
SH	:	Sarjana Hukum
Pemkab	:	pemerintah Kabupaten
RASKIN	:	Beras Miskin
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
DEPKES	:	Dinas Kesehatan
Dep. PU	:	Departemen Pekerjaan Umum
Depdiknas	:	Departemen Pendidikan Nasional
Depsos	:	Departemen Sosial
PPK	:	Program Pengembangan Kecamatan
DEPDAGRI	:	Departemen Dalam Negeri

TK-PKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Ormas	:	Organisasi Kemasyarakatan
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
ND	:	<i>Neighborhood Development</i>
P2LPT	:	Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Terpadu
RKPD	:	Rencana Keuangan Pemerintah Daerah
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
P2KP- DT	:	Pengembangan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal
PAWONSARI	:	Pacitan-Wonogiri-Wonosari
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
TK-PKD	:	Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah
KPK	:	Komite Penanggulangan Kemiskinan
PSIA	:	<i>Poverty and Social Impact Analysis</i>
MI	:	Maarif Institute
SDA	:	sumber daya alam
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
KUD	:	Koperasi Unit Desa
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
ASKESKIN	:	Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
MCK	:	Mandi-Cuci-Kakus
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
TK	:	Taman Kanak-Kanak
PT	:	Perguruan Tinggi
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
KKG	:	Kelompok Kerja Guru
PBS	:	Pemberantasan Buta Aksara
UC	:	<i>UNIT COST</i>
KBM	:	kegiatan belajar mengajar
TKAK	:	Tim Anti Korupsi Muhammadiyah
BOS	:	Biaya Operasional Sekolah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Posyandu	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PKK	:	Program Kesejahteraan Keluarga
UU	:	Undang-undang
WHO	:	World Health Organization
PMT	:	Pemberian makanan tambahan
ASI	:	Air Susu Ibu
PMTAS	:	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
KB	:	Keluarga Berencana
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
JAMKESOS	:	Jaminan Kesehatan Sosial
SPM	:	Standar Pelayanan Minimum
ADD	:	Alokasi Dana Desa

Daftar Pustaka

- Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*
- BPS Kabupaten Gunungkidul, 2005, *Gunungkidul Dalam Angka 2004—2005*,
- BPS Kabupaten Gunungkidul, 2006, *Gunungkidul Dalam Angka 2005—2006*,
- BPS Kabupaten Gunungkidul, 2007, *Gunungkidul Dalam Angka 2006—2007*,
- Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2006
- Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, "Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008"
- Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2007, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Gunungkidul*
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Human Indeks Developmens